



**ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PPN PADA
MASA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI DI DINAS
PERTANIAN KAB. LABUHAN BATU**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas
Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas
Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NADILAH HUMAIRAH

NPM: 1815400040

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NADILAH HUMAIRAH
NPM : 1815400040
PROGRAMSTUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDULSKRIPSI : ANALISIS PERBANDINGAN
PEMUNGUTAN PPN PADA MASA
SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI DI
DINAS PERTANIAN
KAB. LABUHANBATU

MEDAN, 2021

KETUA PROGRAMSTUDI


Junawan, SE., M.Si



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

PEMBIMBING I


Junawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II


Rahmat Hidayat, SE., MM



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

**TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI
OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS
SOSIAL SAINS UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

PERSETUJUAN UJIAN

**NAMA : NADILAH HUMAIRAH
NPM : 1815400040
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : ANALISIS PERBANDINGAN
PEMUNGUTAN PPN PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA
PANDEMI DI DINAS ERTANIAN KABUPATEN LABUHAN
BATU**

Medan, Agustus 2020

KETUA

Sumardi Adiman, SE., Ak., M.Si., BKP

ANGGOTA I

Junawan, SE., M.Si

ANGGOTA II

Rahmat Hidayat, SE., MM

ANGGOTA III

Miftha Rizkina SE., Ak., M.Si., BKP

ANGGOTA IV

Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADILAH HUMAIRAH
Tempat/TanggalLahir : Medan, 4 Oktober 2000
NPM : 1815400040
Fakultas : Sosial & Sains
ProgramStudi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Tj. Anom komp. Griya permata IV
JudulSkripsi : Analisis Perbandingan Pemungutan PPN
Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi
Di Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Medan, Agustus 2021



Nadilah Humairah
1815400040

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NADILAH HUMAIRAH
Fakultas/Program Studi : Fakultas Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan PPN
Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi Di Dinas
Pertanian Kab. Labuhanbatu

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan Agustus 2021



Nadilah Humairah
1815400040

see July by
09/11/2021



Acc Jhid
09/11/2021

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PPN PADA
MASA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI DI DINAS
PERTANIAN KAB. LABUHAN BATU**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas
Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas
Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NADILAH HUMAIRAH

NPM: 1815400040

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

see Sudy
04/08/2021



**ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PPN
PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA
PANDEMI DI DINAS PERTANIAN
KAB. LABUHAN BATU**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca
Budi Medan

Oleh:

NADILAH HUMAIRAH

NPM: 1815400040

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

Kec Sidang
Kadis
Kec Sidang



**ANALISIS TINGKAT PERBANDINGAN PEMUNGUTAN
PPN PADA MASA SEBELUM DAN SELAMA
PANDEMI DI DINAS PERTANIAN
KAB. LABUHAN BATU**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NADILAH HUMAIRAH

NPM: 1815400040

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

2021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: NADILLAH HUMAIRAH
Tgl. Lahir	: MEDAN / 04 Oktober 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1815400040
Program Studi	: Perpajakan
Kategori	:
Nilai Kredit yang telah dicapai	: 88 SKS, IPK 3.82
Nomor Hp	: 083185155747
Yang ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai	:

Judul

Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan PPN Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu

Disisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 14 April 2021

Pemohon,

(Nadillah Humairah)

Tanggal :

Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Perpajakan

(Junawan, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Rahmat Hidayat, SE., MM)



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NADILAH HUMAIRAH
NPM : 1815400040
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Rahmat Hidayat, SE., MM
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan PPn Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
14 April 2021	file nya tolong di lampirkan ya	Revisi	
14 April 2021	jika ada kendala sampaikan	Revisi	
14 April 2021	ACC	Disetujui	
15 Agustus 2021	Acc	Disetujui	
04 November 2021	Acc	Disetujui	

Medan, 04 November 2021
Dosen Pembimbing,



Rahmat Hidayat, SE., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : NADILAH HUMAIRAH
NPM : 1815400040
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Junawan, SE., M.Si
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan PPh Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 April 2021	Acc Sempro	Disetujui	
10 Agustus 2021	Acc Sidang	Disetujui	
04 November 2021	Acc Jilid	Disetujui	

Medan, 04 November 2021
Dosen Pembimbing,



Junawan, SE., M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : ~~Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM~~ *Junawan, SE, M.Si*
 Pembimbing II : Rahmat Hidayat, SE., MM
 Nama Mahasiswa : Nadilah Humairah
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok : 1815400054
 Mahasiswa Jenjang : D-III
 Judul Tugas : Analisis tingkat perbandingan pemungutan PPN pada masa sebelum dan selama pandemi
 Jenis Skripsi : di Dinas Pertanian kab.Labuhanbatu

WAKTU	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2021	file nya tolong di lampirkan ya		Rahmat Hidayat, SE., MM Pembimbing 2
2021	jika ada kendala sampaikan		Rahmat Hidayat, SE., MM Pembimbing 2
2021	ACC		Rahmat Hidayat, SE., MM Pembimbing 2
	<i>aku salah ketik 2 kurang kurang, Spasi dll</i>		
	<i>ACC sesuai proposal</i>		

Medan, 14 April 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko., SE., MM



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Junawan, SE., M.Si
 Pembimbing II : Rahmad Hidayat, SE., MM
 Nama Mahasiswa : Nadilah Humairah
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok : 1815400054
 Mahasiswa Jenjang : D-III
 Judul Tugas : Analisis tingkat perbandingan pemungutan PPn pada masa sebelum dan selama pandemi
 Di Dinas Pertanian Kab.Labuhanbatu
 Skripsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
03/2021	Revisi 1	[Signature]	Junawan, SE.M.Si
	Revisi 2	[Signature]	Junawan, SE.M.Si
	Revisi 3	[Signature]	Junawan, SE.M., Si
	Revisi 4	[Signature]	Junawan, SE.M.Si
	Revisi 5	[Signature]	Junawan, SE.M.Si
04/2021	Revisi 6	[Signature]	

Medan, 14 April 2021
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko., SE., MM



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Junawan, SE.M.Si
Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat SE.,MM
Nama Mahasiswa : NADILAH HUMAIRAH
Jurusan/Program Studi : Perpajakan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400040
Tingkat Pendidikan : D-III
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perbandingan Pemungutan PPN pada masa sebelum dan Selama Pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/08/2021	Penyusunan dan pembahasan bab 1 dan 2 serta bab 3 dan 4	<i>[Signature]</i>	
15/08/2021	Bab 5 dan 6	<i>[Signature]</i>	

Medan, 4 Agustus Juli
2021 Diketahui/Disetujui
oleh : Dejan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Junawan, SE.M.Si
 Dosen Pembimbing II : Rahmat Hidayat SE.,MM
 Nama Mahasiswa : NADILAH HUMAIRAH
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1815400040
 Tingkat Pendidikan : D-III
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perbandingan Pemungutan PPN pada masa sebelum dan Selama Pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Bab I		
	Bab II		
	Bab III		
	Bab IV - Bab V		
	Acc sidang		

Medan, 4 Agustus Juli
 2021 Diketahui/Ditetapkan
 oleh: Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 221/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: NADILAH HUMAIRAH

: 1815400040

Semester : Akhir

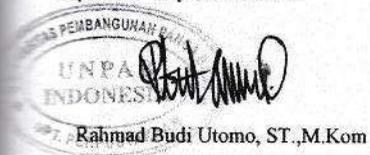
: SOSIAL SAINS

Studi : Perpajakan

Sejak terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku. Tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Agustus 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Dokumen: FM-PERPUS-06-01

: 01

Tanggal : 04 Juni 2015

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-------------------------	-------------	-----------------------

Analisis dokumen NADILAH HUMAIRAH_1815400040_PERPAJAKAN.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

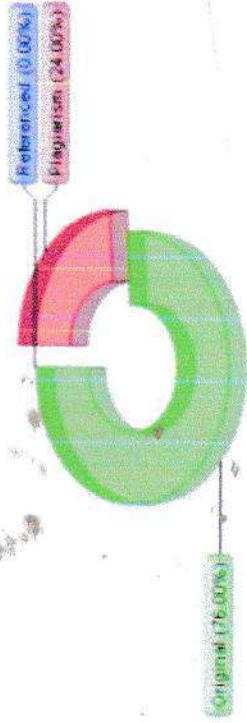
1. Comparison Preset Rewrite 2. Contacted language.

3. Check type Internet Check

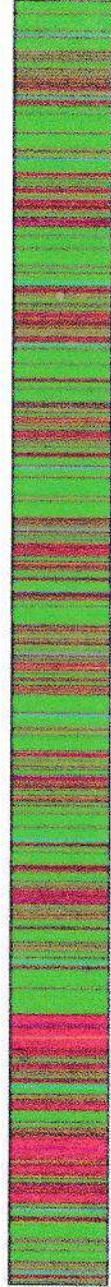


Outside document body analysis

1. Relations chart



2. Distribution graphs



3. Top sources of plagiarism: 37

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 05 Agustus 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : NADILAH HUMAIRAH
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 04 Oktober 2000
Nama Orang Tua : AHMAD SOLANHUDDIN
N.I.P. / M : 1815400040
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
No. HP : 083185155747
Alamat : Jl. Setia Budi psr I Gg. anyetir

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan Pajak Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah di jilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiplidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



NADILAH HUMAIRAH
1815400040

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRACT

Humairah, Nadilah. 2021. "*Analysis of the Comparative Level of VAT Collection in the Period Before and During the Pandemic at the Labuhan Batu Regency Agriculture Service*". D3 Taxation Study Program, Faculty of Social Sciences. Panca Budi Development University, Medan. Thesis.

This study aims to find out how the level of comparison of VAT collection at the Labuhan Batu Regency Agriculture Office before and during the pandemic. The method used in this study is descriptive analysis. With this method, research data is compiled, interpreted, analyzed, and described. The data used in this study are qualitative data types, data obtained from the Labuhan Batu Regency Agriculture Service for the March-December 2019-2020 period. The results of this study conclude that: 1). The lack of budget from the government caused by the Covid-19 virus outbreak caused a decrease from before to the pandemic period. 2). The Labuhan Batu Regency Agriculture Service has carried out collections in accordance with Law Number 8 of 1983 which has been amended several times in the third amendment to Law Number 42 of 2009 and PMK PPN Number 06/PMK/2021 regarding the calculation and withholding of VAT in connection with goods and suits. 3). There are differences in the calculation mechanism carried out by the treasurer relating to Article 22 of Income Tax for the central government and local governments.

Keywords: Comparison, Withholding, VAT, Covid-19.Humairah,

ABSTRAK

Nadilah.2021. “ *Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan PPN Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu*”.Program Studi D3 Perpajakan, Fakultas Sosial Sains.Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Tugas Akhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat perbandingan pemungutan PPN Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu selama sebelum dan semasa pandemi.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis Deskriptif.Dengan metode ini, data penelitian di kompilasi, ditafsirkan, dianalisis, dan di jabarkan.Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada jenis data kualitatif, data yang di peroleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Periode Maret- Desember 2019-2020. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa : 1). Kurangnya anggaran dari pemerintah yang disebabkan adanya wabah virus covid-19 maka terjadinya penurunan dari sebelum ke masa pandemi. 2). Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu sudah menjalankan pemungutan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali di ubah dalam perubahan ketiga menjadi Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan PMK PPN Nomor 06/PMK/2021 tentang perhitungan dan pemotongan PPN sehubungan dengan barang dan jas. 3). Adanya perbedaan mekanisme perhitungan yang dilakukan bendaharawan yang berkaitan dengan PPh pasal 22 atas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kata kunci: Perbandingan, Pemotongan, PPN, Covid-19.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan PPN Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi Di Dinas Pertanian Kab. Labuhan Batu**”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu program menyelesaikan study Diploma Tiga (D-III) Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Dalam Menyusun tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H, M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan SE., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan sekaligus dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian Laporan Tugas akhir.
4. Bapak **Rahmat Hidayat, SE., MM** selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan yang membangun bagi penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

5. Bapak **Dr.Abdul Khadir SH.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran serta dorongan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Kedua Orangtua ku Tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan baik secara moral maupun material, kekuatan Do'a dan ridho nya dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan adik-adikku tersayang yang selalu membantu walau dengan hal kecil, tetapi sangat bermanfaat untukku.
7. Teruntuk sepupuku, sekaligus Teman dalam Kondisi apapun **Hanny Cahya Madina** yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas akhir ini yang saling memberikan dukungan, dan Teman-Teman seperjuangan (**Nabilla, Kartika, Rika, Novita, Elsa**).
8. Saudara-saudara serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penyusunan Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi penyajian maupun segi ilmiahnya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini berguna bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan, Agustus 2021

NADILAH HUMAIRAH
NPM: 1815400040

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Derfinisi Pajak	9
2. Sistem Pemungutan Pajak	12
3. Pembagian Pajak.....	12
4. Sanksi Pajak	13
5. Hukum Pajak	15
B. Pajak Pertambahan Nilai	30
C. Penelitian Terdahulu.....	32
D. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Definisi Operasional Variabel	34
D. Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data.....	
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pertanian Kab. Labuhan	38
2. Visi dan Misi Kantor Dinas Pertanian Kab. Labuhan	40
3. Struktur Organisasi	44
4. Tugas Pokok & Fungsi	45
5. Pegumpulan Data Pemungutan PPN atas Transaksi.....	59
B. Pembahasan	80

BAB V	PENUTUPAN	89
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	
Tabel 4.1 Data Transaksi atas Pemungutan PPN Maret 2019 dan 2020.....	
Tabel 4.2 Data Transaksi atas Pemungutan PPN April 2019 dan 2020.....	
Tabel 4.3 Data Transaksi atas Pemungutan PPN Mei 2019 dan 2020.....	
Tabel 4.4 Data Transaksi atas Pemungutan PPN Juli 2019 dan 2020	
Tabel 4.5 Data Transaksi atas Pemungutan PPN Agustus 2019 dan 2020	
Tabel 4.6 Data Transaksi atas Pemungutan PPN Oktober 2019 dan 2020	
Tabel 4.7 Data Transaksi atas Pemungutan PPN November 2019 dan 2020	
Tabel 4.8 Data Transaksi atas Pemungutan PPN Desember 2019 dan 2020	
Tabel 4.9 Data Rekapitulasi atas Pemungutan PPN Maret 2019 dan 2020	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kab. Labuhan Batu	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai mana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur.maka pemerintah (Negara) berusaha untuk dapat menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya.untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan.

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan Negara donatur,maka pembiayaan pembangunan di upayakan untuk bertumpu pada kemandirian.oleh karena itu,diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat.

Pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun.Hal itu disebabkan kebutuhan belanja Negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah dibidang penerimaan Negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya

meningkatkan penerimaan pajak.maka pemerintahan menempatkan perpajakan sebagai pengadaan dana yang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).menurut Undang-undang PPN Nomor 8 Tahun1983 yang telah di ubah beberapa kali dalam perubahan ketiga menjadi Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentangpajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dititik beratkan pada objek pajak itu sendiri yang wajib dipungut oleh wajib pajak pada waktu terjadinya penyerahan barang kena pajak dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak Di dalam daerah pabean Republik Indonesia.semakin besar pajak yang di bayarkan,maka pendapatan Negara semakinbanyak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang memerlukan perta serta dunia usaha dalam melaksankannya.perusahaan merupakan pihak yang terlibat dalam memegang peran penting dalam pelaksanaan Undang-Undang perpajakannya. Secara umum,tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku adalah 10% yang pengenaannya diterapkan pada tingkat penyerahan barang oleh pabrikan atau importer atau pengusaha kena pajak lainnya,sebagai tarif menjadi beban konsumen tidak akan melampaui batas 10% dari harga eceran.untuk Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dikenai pajak serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi adalah 75%, Adapun penambahan perhitungan dalam PPN atas pengadaan barang masih berkaitan dengan PPh tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan bendahara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, BUMN adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final,

.atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang. faktur pajak merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai,karena faktur ini merupakan bukti pungutan bagi pengusaha dapat dipungut,diperhitungkan dengan jumlah pajak yangterutang.

Kementerian keuangan mencatat realisasi penerimaan PPN hingga akhir Juni 2020 mencapai Rp.189,5 Triliun dan turun 10,7% dari periode yang samatahun lalu. Menteri keuangan juga menyebut kontraksi reaksi PPN sebagai akibat pandemi.namun selanjutnya penerimaan hingga semester I /2020 mulai membaik ketimbang saat Mei 2020.

Tetapi hal yang menjadi fenomena permasalahan saat ini adalah dinas pertanian Kab.Labuhanbatu mengalami penurunan sebagai pemungut PPN atas pengadaan barang. Dimana tingkat perbandingan pemungutan dari tahun sebelumnya yang sangat menurun dikarenakan wabah virus pandemi.Sehingga anggaran dari pemerintah itu sendiri berkurang dari tahun sebelumnya. Pada sepuluh bulan sebelum pandemi masih dikatakan membaik dan signifikan dengan total Rp.53.228.117 10% dari total pengenaan pajak, kemudian sepuluh bulan disaat pandemi mengalami penurunan tercatat Rp.13.218.806 10% dari total pengenaan pajak.

Berdasarkan temuan yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **”ANALISIS PERBANDINGAN PEMUNGUTAN PPN PADA MASA SEBELUM PANDEMI DAN SELAMA PANDEMI DI DINAS PERTANIANKAB.LABUHANBATU”**.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu:

1. Terjadinya penurunan jumlah PPN atas pengadaan barang pada dinas pertanian Kabupaten Labuhan Batu sebelum dan selama pandemi.
2. Adanya perbedaan terhadap sistem pemungutan PPN atas pengadaan barang.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis mengkaji tentang tingkat perbandingan pemungutan PPN atas pengadaan barang pada Dinas pertanian Kabupaten Labuhan Batu yang dihitung mulai sepuluh bulan sebelum dan selama pandemi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tingkat perbandingan pemungutan PPN atas pengadaan barang pada Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu pada masa sebelum dan selama pandemi?.
2. Apakah sistem pemungutan PPN atas pengadaan barang di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan batu sudah sesuai dengan UU 42 Tahun 2009?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat perbandingan pemungutan PPN pada dinas pertanian Kab.labuhanatu pada masa sebelum dan terjadinya pandemi.
- b. Untuk menganalisis penyebab terjadinya penurunan PPN terhadap dampak covid-19.

2. Manfaat

- a. Bagi penulis, sebagai wawasan dan pengetahuan penelitian di bidang perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan contoh referensi untuk tugas akhir (TA) angkatan mahasiswa di tahun berikutnya Yang akan menyelesaikan studi akhir untuk mendapatkan gelar ahli madya penyelesaian pendidikan di Universitas pembangunan PancaBudi.
- c. Bagi pihak lain, sebagai penambahan wawasan khususnya tentang PPN demi meningkatkan sektor pembangunan Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Undang-undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, adapun menurut roechmat soemitro (dalam Suandy, 2011” dalam bukunya dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dengan penjelasan sebagai berikut:”dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak di bayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu seperti halnya retribusi. Dari pengertian di atas

,dapat disimpulkan cirri-ciri pajak yang melekat dalam pengertian pajak diatas sebagai berikut:(Suandy,2010:10)

- a) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
- b) Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya,sehingga dapat dipaksakan.
- c) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah maupun pemerintah daerah.
- e) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- f) Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

2. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dapat dibagi sebagai berikut: (Mardiasmo,2010:7) :

a) Official assessmentsystem

Merupakan suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.adapun cirri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- 2) Wajib pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) Self assessmentsystem

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.adapun cirri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada ada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif,mulai dari menghitung,menyetor,dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanyamengawasi.

c) Withholdingsystem

Merupakan suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3. Pembagian pajak

Pajak menurut pembagiannya digolongkan menjadi 3 yaitu:

a. Pembagian pajak berdasarkangolongannya:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat diahlikan kepada pihak lain.

Misalnya: Pajak Penghasilan(PPh).

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain sehingga sering disebut juga pajak tidak langsung. Misalnya: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

b. Pembagian pajak berdasarkan sifatnya:

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi /keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaannya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum.

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan.

c. Pajak berdasarkan wewenang pemungutannya.

1) Pajak Pusat/Negara

Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jenderal pajak. Pajak pusat diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

4. Sanksi Pajak

Menurut Tjahjono(2010), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. itulah sebab pentingnya bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo,2010).

Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukkan surat pemberitahuan tepat pada waktunya belum di perhatikan. saat ini DJP masih berfokus pada pemberian sanksi negative dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap perturan perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Bruton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

- a. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
- b. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukkan surat pemberitahuan tepat waktu.
- c. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- d. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal diatas, paling efektif menurut Ilyas dan Bruton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi (*law inforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen, sekarang ini wajib pajak yang tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT dikenakan denda SPT ditambah Rp.100.000, atau 500.000 atau 1.000.000. semakin tinggi atau beratnya sanksi maka akan semakin merugikan wajib pajak. oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Hukum Pajak

Beberapa pendapat para ahli tentang hukum pajak. menurut Bohari, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. secara umum, Hukum pajak merupakan mengatur hubungan antar pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak yaitu: hukum pajak materil, dan hukum pajak formil.

- a) Hukum pajak materil, menurut norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
- b) Hukum Pajak Formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil).

B. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut mardiasmo (201:294) undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) adalah undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak atas penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 42 tahun 2009. Undang-undang ini disebut undang-undang pajak pertambahan nilai 1984.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak yang tidak langsung, yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang di tanggung.

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean dan/atau impor barang kena pajak. sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha jasa kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak. Mardiasmo (2011:294)

Karakteristik PPN yang berlaku di Indonesia (Untung Sukardji, 2011:1) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan ke pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak).

2. Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan.

3. PPN Bersifat *Multi Stage Levy*

4. *Multi Stage Levy*

Mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hal ini berarti PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi BKP atau JKP. Perhitungan PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Menggunakan *Indirect Subtraction Method*. *Indirect Subtraction Method* (metode pengurangan secara tidak langsung), yaitu dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa.

5. PPN Bersifat Non Kumulatif

PPN tidak bersifat kumulatif (non kumulatif) meskipun memiliki karakteristik *Multi Stage Tax* karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang atau jasa.

6. PPN Menganut Tarif Tunggal (*Single Rate*)

PPN di Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk penyerahan ekspor.

7. PPN yang Diterapkan di Indonesia Adalah PPN Tipe Konsumsi (*Consumption Type VAT*).

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*consumption type VAT*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak.

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan 3 UU PPN 1984 merumuskan sebagai berikut. "Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini."

Pada dasarnya semua barang dikenai PPN, kecuali barang-barang tertentu yang disebutkan dalam UU PPN, barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat 2 UU PPN 1984 didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Diambil langsung dari sumbernya artinya barang tersebut belum diolah atau belum diproses. Sesuai dengan penjelasan pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984 huruf a, yang dimaksud dengan barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti:
 - 1) Minyak mentah (*crude oil*);
 - 2) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.

- 3) Panas Bumi;
- 4) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
- 5) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- 6) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijihperak serta bijihbauksit.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok dalam hal ini, diatur dalam penjelasan pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN 1984. Dalam Undang-Undang PPN ini dirinci jenis barang kebutuhan pokok dimaksud yang meliputi :

- 1) Beras
- 2) Gabah
- 3) Jagung;
- 4) Sagu;
- 5) Kedelai;
- 6) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
- 7) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain

dan/atau direbus.

- 8) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
- 9) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- 10) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-*grading*, dan/atau dikemas atau tidak dikemas, dan;
- 11) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- 12) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- 13) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Dalam Pasal 1 angka 5 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa: “Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai,

termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.”

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, meliputi:
 - a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - b) Jasa dokter hewan;
 - c) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi dan fisioterapi;
 - d) Jasa dukun bayi;
 - e) Jasa paramedis dan perawat;
 - f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan Sanatorium;
 - g) Jasa psikolog dan psikiater; dan
 - h) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi:
 - a) Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo;
 - b) Jasa pemadam kebakaran;
 - c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d) Jasa lembaga rehabilitasi;
 - e) Jasa penyedia rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium;
 - f) Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel
- d. Jasa Keuangan, meliputi:
 - 1) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - 3) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anak piutang, usaha kartu kredit, dan/atau pembiayaan konsumen;
 - 4) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - 5) Jasa Penjaminan
- e. Jasa Asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- f. Jasa di bidang keagamaan, meliputi:
 - a) Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b) Jasa pemberian khotbah atau dakwah

- c) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan;
- d) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- g. Jasa di bidang pendidikan, meliputi:
 - 1) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
 - 2) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
- h. Jasa di bidang kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni yang telah dikenakan Pajak Tontonan.
- i. Jasa di bidang penyiaran meliputi jasa penyiaran radio dan televisi baik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah maupun swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bersetujuan komersial.
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- k. Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi:
 - 1) Jasa tenaga kerja;
 - 2) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut;
 - 3) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
- l. Jasa di bidang perhotelan, meliputi :
 - 1) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan

perhotelan untuk tamuyang menginap;

2) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hotel.

- m. Jasa penyediaan tempat parkir, yaitu jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- n. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, yaitu jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- o. Jasa penerimaan uang dengan weselpos
- p. Jasa boga atau catering.

3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Objek PPN

1) Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, dengan syarat-syarat berikut:

- a) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
- b) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP yang tidak berwujud.
- c) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- d) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan

2) Impor BKP

Pemungutan pajak atas impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Siapapun yang memasukkan BKP ke dalam Daerah Pabean dikenakan pajak tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak.

3) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:

- a) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - b) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
 - c) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merk dagang, waralaba) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain) di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan orang lain.
- 8) Penyerahan BKP berupa aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat di kreditkan

b. Subjek PPN

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikreditkan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP Dalam Pasal 1 ayat (1) PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN “Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).”

4. Pemungut PPN

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Yang termasuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan menjadi Wajib Pungut (WAPU) PPN antara lain:

- a. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
- b. Kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas bumi; dan kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi;
- c. Badan Usaha Milik Negara. Wajib Pungut PPN melakukan pemungutan PPN/PPnBM terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Wajib Pungut tersebut.

Rekanan adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin, atau Badan Usaha Milik Negara. Pemungut PPN memiliki kewajiban-kewajiban sebagai konsekuensi penunjukan sebagai pemungut PPN.

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak).
- 2) Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

5. Tarif PPN

Penghitungan PPN yang terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan tidak termasuk PPN;
- b. 10/110 (sepuluh per seratus sepuluh) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan

atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak, jika dalam jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan sudah termasuk PPN;

- c. Dalam hal tidak ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan atau ditemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan bahwa dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk PPN, maka PPN yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

6. Tata Cara Penyetoran PPN yang diPungut

PPN yang terutang atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

7. PPN atas pengadaan barang

Tarif PPN atas pembelian barang adalah 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga barang itu sendiri. Adapun perhitungan tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan bendahara pemerintah, BUMN/BUMD adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Tarif PPh Pasal 22 ini juga terdapat pada UU PPh terkait pemungut dan objek PPh Pasal 22 butir 2,3, dan 4.

Besarnya PPh pasal 22 yang di pungut adalah $1,5\% \times \text{Harga beli (tidak termasuk PPN)}$ Di pungut oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagai pemungut pajak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. kemudian pupuk pada dinas pertanian kabupaten labuhan batu tidak terkena PPN dikarenakan pupuk yang diberikan berupa pupuk subsidi atau pupuk yang diberikan oleh pemerintah daerah.

c. Penelitian Terdahulu

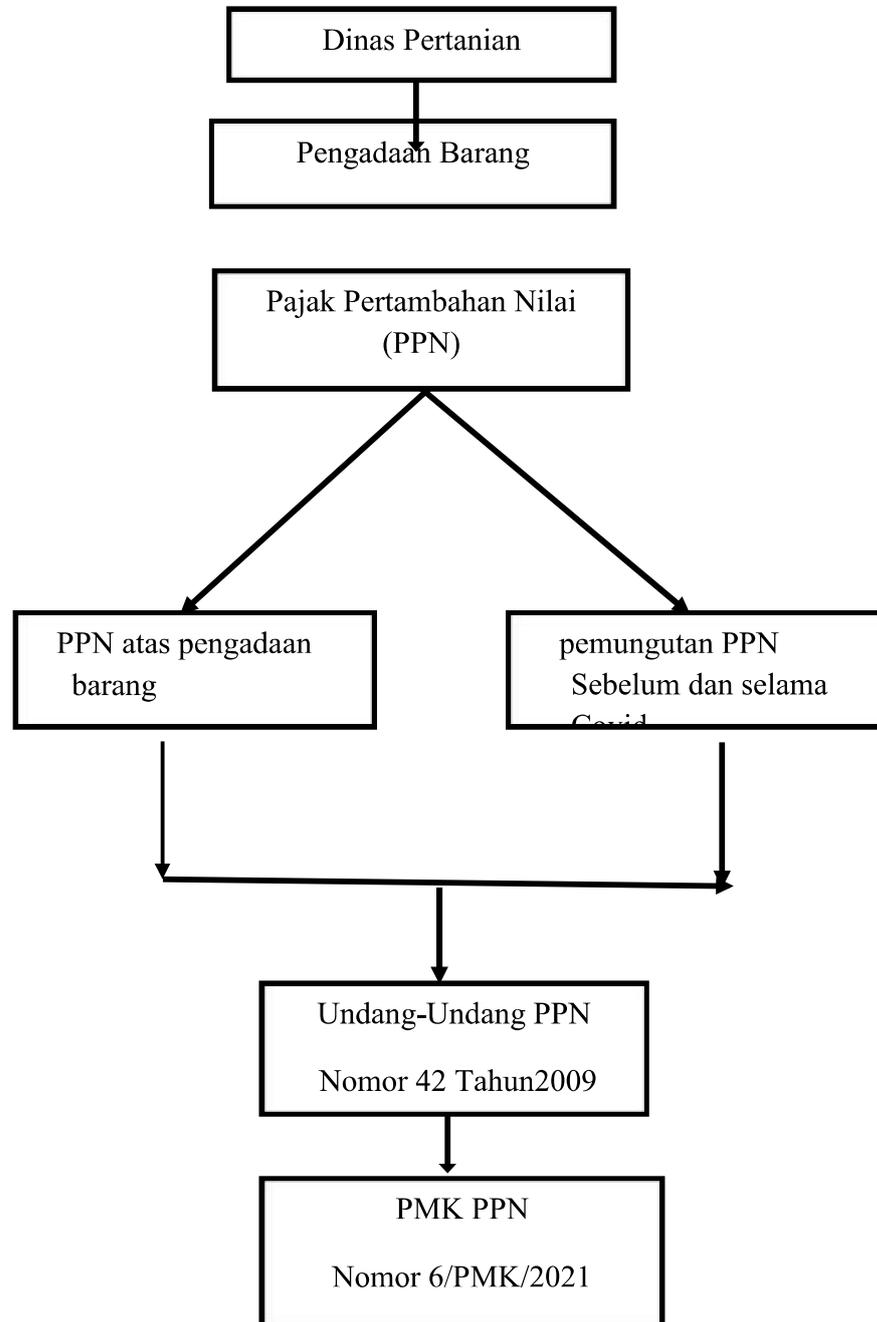
Daftar Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Metode Analisis	Hasil Analisis
1	Astria (2020)	Penerapan PPN atas pengadaan barang pada PT. GIANT INDONESIA cabang sultan Allauddin	Penerapan PPN atas pengadaan barang	Deskriptif kualitatif	Penerapan PPN berjalan sesuai apa yang telah ditentukan oleh pusat PT. GIANT INDONESIA
2	Amalia putri (2018)	Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang pada PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN	Penghitungan PPN atas penjualan barang	Deskriptif	Perhitungan PPN pada PT. CENTRAL WIJAYA MEDAN telah sesuai dengan Undang-undang
3	Dewanty putri efendy (2016)	Analisis pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah (studi kasus pada kantor keuangan korelasi/santiago)	Pemungutan PPN	Kualitatif	Bendahara pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan (KPPN) ditunjuk sebagai pemungut PPN telah dilakukan sesuai ketentuan
4	Watik chandrawijaya (2018)	Prosedur pengenaan PPN atas pengadaan barang kena pajak	PPN atas pengadaan barang	deskriptif	Prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan undang-undang

		pada PT Perkebunan nusantara XI PERSERO PG.OLEAN SITUBONDO			
5	Rahmalia (2017)	Prosedur perhitungan dan pelaporan PPN atas pengadaan barang yang didanai sumber dana otsus pada dinas perhubungan kota banda aceh	PPN atas pengadaan barang	deskriptif	Bahwa perhitungan PPN yang dilakukan oleh kantor Dinas perhubungan kota Banda Aceh dan pelaporan PPN menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)

d. KerangkaKonseptual

Berdasarkan uraian dapat dilihat gambaran kerangka koseptual dalam penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang harus ditempuh dalam kegiatan penelitian agar tujuan yang ingin dicapai dari suatu penelitian dapat diterima secara ilmiah. Penelitian ini sifatnya deskriptif karena hanya menggunakan paparan-paparan dari fakta-fakta yang didapat ditempat penelitian. Penelitian kemudian dianalisis dengan kajian teori yang ada serta kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang ada.

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2016)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu, yang terletak di Jl. WR. Supratman No. 24 Rantau Prapat Sumatera Utara.

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai Desember 2020 sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan langsung.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		Desember 2020	Januari 2021	Febuari 2021	Maret 2021	April 2021
1.	Pengajuan Judul Tugas akhir					
2.	Pembuatan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Pengolahan Data					
6.	Sidang Meja Hijau					

C. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai atau obyek atau kegiatan yang memiliki variasi atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2015).

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Defenisi
Transaksi atas pemungutan pengadaaan barang	10% x dasar pengenaan pajak (DPP)	dimana anggaran pemerintah yang sangat mendukung sehingga pemungut PPN masih maksimal dan masih dikatakan signifikan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10% X Dasar pengenaan pajak (DPP),	Mengalami penurunan disebabkan anggaran dari pemerintah yang tidak seperti tahun sebelumnya, sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal.

Sumber:Peneliti(2021)

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan SumberData

1. Populasi

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas wilayah subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2018:130).

Berdasarkan pengertian populasi di atas, maka yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Bendaharawan pemungut PPN atas pengadaaan barang di Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada,

sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang di dasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada (Sugiyono 2011:81). Berdasarkan pengertian sampel di atas, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah data atas pengadaan barang alat tulis kantor terhitung sepuluh bulan pertahun dari Tahun 2019-2020.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pada penelitian ini adalah data kualitatif. data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan pengelompokkan atau karakteristik yang tidak dapat di ukur ukurannya, dengan kata lain data kualitatif di ekspresikan dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna.

4. Sumber Data

Sumber data pada peneletian ini ialah Data Sekunder. Menurut Husein Umar (2013:42) data sekunder adalah merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik dokumentasi

Dokumentasi menurut sugiyono (2016:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bukti

setoran pemungut PPN atas pengadaan barang di Dinas Pertanian Kab.Labuhanbatu.

b. Teknik Wawancara

Yaitu teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan lisan maupun tulisan kepada responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara online melalui via *whatsapp*, dikarenakan situasi pandemi.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dimana jenis penelitian yang digunakan adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Teknik analisis data ini berupa pemberian data sekunder atas transaksi pemungut PPN atas pengadaan barang

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data ini adalah:

- a. Mengambil data
- b. Mengolah data
- c. Melihat data jumlah PPN atas pengadaan barang seluruhnya yang dibutuhkan.
- d. Melakukan analisis terhadap nilai PPN atas pengadaan barang pada saat sebelum dan selama pandemi.
- e. Melakukan tingkat perbandingan atas hasil yang di analisis terhadap nilai PPN atas pengadaan barang di Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu

Merupakan kantor Dinas Pertanian daerah Kabupaten Labuhan Batu, provinsi Sumatera Utara. Dinas Pertanian ini berfungsi untuk menyelenggarakan urusan kewenangan dan tugas pembantuan bidang pertanian daerah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Selain itu, dinas pertanian juga memiliki beberapa tugas dan fungsi lain seperti penyuluhan pertanian, merumuskan kebijakan pertanian, memutuskan kebijakan bidang pangan, administrasi ketatausahaan pertanian, pembinaan teknis pada pihak-pihak bidang pertanian, memastikan ketersediaan pupuk pertanian, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pendukung pertanian. Selain itu, dinas pertanian juga adalah penjamis kesejahteraan petani melalui program memastikan memberikan asuransi usaha tani padi (AUPT). Oleh karenanya, terkait dengan fungsi dan tugasnya, dinas pertanian memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat izin pertanian, izin alih fungsi, izin usaha pertanian, pembukaan lahan dan izin lainnya terkait pertanian. Segera kunjungi kantor dinas pertanian terdekat untuk informasi lainnya.

2. Visi Dan Misi Kantor Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu

Adapun Visi dan Misi Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagaiberikut:

a. Visi:

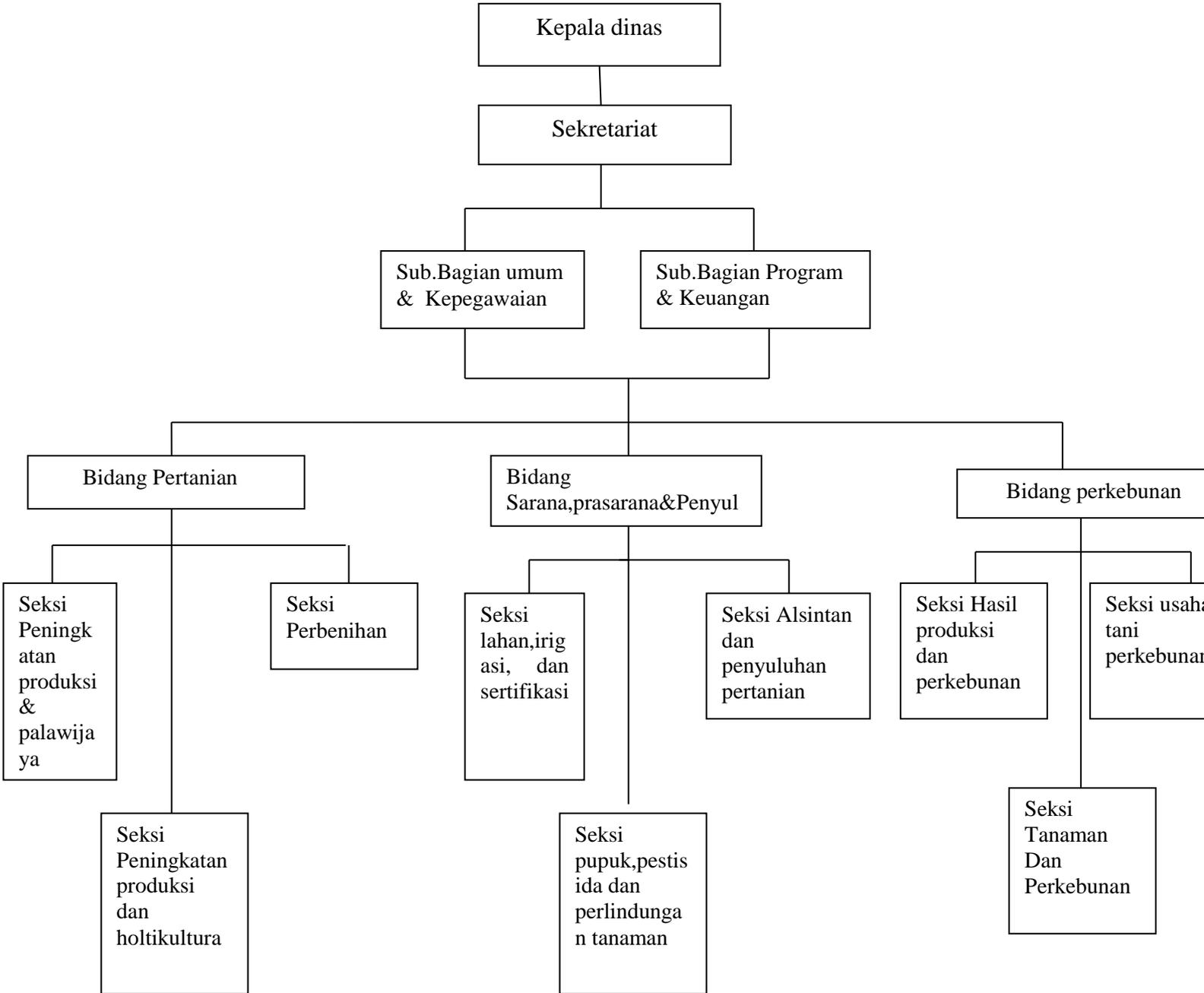
“Terwujudnya Pertanian dan Perikanan Yang Berdaya Saing”.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, produksi pertanian, ketahanan pangan dengan pemanfaatan teknologi pertanian.
- 2) Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan produksi hasil pertanian.
- 3) Meningkatkan budidaya, produksi dan sistem perikanan.

3. Struktur Organisasi Kantor Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kabupaten Labuhan Batu



4. Tugas Dan Fungsi Kantor Dinas Pertanian Kab.Labuhan Batu

a. Kepala Dinas

Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang pertanian,perkebunan,sarana,dan prasarana pertanian dan penyuluhan pertanian serta bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pertanian,perkebunan ,sarana dan prasarana pertanian dan penyuluhan pertanian.
- 2) Pengembangan prasarana pertanian,perkebunan dan penyuluhan pertanian.
- 3) Pengawasan mutu,peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pertanian dan perkebunan.
- 4) Pengawasan penggunaan sarana pertanian,perkebunan dan penyuluhan pertanian.
- 5) Pembinaan produksi di bidang pertanian dan perkebunan.
- 6) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit pertanian dan perkebunan
- 7) Pemberian rekomendasi teknis pertanian dan perkebunan.
- 8) Supervisi dan evaluasi dibidang pertanian,perkebunan, dan penyuluhan pertanian
- 9) Pelaksanaan administrasi dinas pertanian,dan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

b. Sekretariat

Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepala seluruh unit organisasi dilingkungan dinas.

Fungsi:

- 1) Mengoordinasikan perumusan rencana dan program kerja di lingkungan dinas.
- 2) Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga dinas;
- 3) Melaksanakan rencana anggaran belanja dinas.
- 4) Menyelenggarakan urusan keuangan dinas .
- 5) Mempersiapkan naskah rancangan peraturan dan kebijakan dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok dinas.
- 6) Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan pengelola data statistik.
- 7) Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di sekretariat dinas.
- 8) Mengoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada dinas.
- 9) Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program dan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Melakukan sebagian tugas sekretaris dalam urusan tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan, protokol, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang

milik Negara serta kepegawaian.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian.
- 2) Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai.
- 3) Melakukan urusan mutasi tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ,pemberhentian dan pensiunan pegawai.
- 4) Melakukan urusan tata usaha kepegawaian ,disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan.
- 6) Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.
- 7) Melakukan urusan kerja sama ,hubungan masyarakat dan protokol.
- 8) Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 9) Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 10) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub bagian umum dan kepegawaian.
- 11) Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU).
- 12) Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang.
- 13) Melakukan penyiapan barang administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara.
- 14) Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor dan ;

15) Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan

d. Sub Bagian Program dan keuangan

Melakukan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pertanian.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian program dan keuangan.
- 2) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program serta pertanggung jawaban dan pengelolaan dokumen keuangan di bidang pertanian.
- 3) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian.
- 4) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian
- 5) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya,daftar isian pelaksanaan anggaran,petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
- 6) Melakukan pengumpulan,pengolahan data dan penyajian data dan statistic di bidang pertanian.

e. Bidang Pertanian

Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian.

Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi di bidang pertanian.
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang pertanian.
- 3) Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang pertanian.
- 4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang pertanian.
- 5) Pemberian rekomendasi teknis di bidang pertanian.
- 6) Supervise dan evaluasi di bidang pertanian dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

f. seksi peningkatan padi produksi padi palawijaya.

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi palawijaya.

Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi peningkatan produksi padi palawijaya.
- 2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi palawijaya.
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang padi palawijaya.
- 4) Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang padi palawijaya.
- 5) Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang padi palawijaya.

- 6) Melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi peningkatan produksi padi palawijaya.
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan.

g. Seksi peningkatan produksi dan holtikultura

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang peningkatan produksi holtikultura.

Fungsi:

- 1) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi peningkatan produksi holtikultura
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dibidang peningkatan produksi holtikultura
- 3) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang holtikultura.
- 4) Melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang produksi holtikultura.
- 5) Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang holtikultura.
- 6) Menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi peningkatan di bidang holtikultura dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

h. Seksi Perbenihan

Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan.

Fungsi:

- 1) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan.
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan.
- 3) Mempersiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan.
- 4) Mempersiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan.
- 5) Mempersiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan.
- 6) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan.
- 7) Mempersiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar dibidang tanaman pangan.
- 8) Mempersiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan.
- 9) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

i. Bidang Sarana Dan Prasarana

Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan pertanian.

Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan pertanian.
- 2) Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian.
- 3) Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian.
- 4) Penyediaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk pestida, serta alat dan mesin pertanian.
- 5) Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian.
- 6) Pemberian fasilitasi investasi pertanian
- 7) Penyelenggaraan penyajian bahan kebijakan, teknologi dan informasi pertanian.
- 8) Penyelenggaraan investarisasi, pengembangan dan pembinaan penyuluhan pertanian.
- 9) Supervisi dan evaluasi di bidang saran, prasarana dan penyuluhan pertanian dan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

j. Seksi Lahan Irigasi dan Sertifikasi

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan, irigasi dan sertifikasi.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan, irigasi dan sertifikasi.
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan, irigasi dan sertifikasi pertanian.
- 3) Melakukan rencana penyediaan pupuk dan pestisida.
- 4) Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida.
- 5) Melakukan penjaminan mutu pupuk dan pestisida.
- 6) Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organism pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 7) Melakukan penyiapan bahan pengamatan organism pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 8) Melakukan menyiapkan bahan pengendalian pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramahan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 9) Melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 10) Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 11) Melakukan penyiapan bahan pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan.
- 12) Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan.

k. Seksi pupuk,pestisida dan perlindungan tanaman.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis,dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk,pestisida dan perlindungan tanaman.
- 2) Melakuakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida dan perlindungan tanaman.
- 3) Melakukan rencana penyediaan pupuk dan pestisida.
- 4) Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida.
- 5) Melakukan penjaminan mutu pupuk dan pestisida.
- 6) Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 7) Melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 8) Melakukan menyiapkan bahan pengendalian pemantauan,bimbingan operasional pengamatan dan peramahan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 9) Melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.
- 10) Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan.

- 11) Melakukan penyiapan bahan pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan.
- 12) Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan.

I. Seksi Alat Mesin Pertanian

Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang alsintan dan penyuluhan pertanian.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang alat mesin pertanian dan penyuluhan pertanian.
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang alat mesin pertanian dan penyuluhan pertanian.
- 3) Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang alat mesin pertanian dan penyuluhan pertanian.
- 4) Pemberian bimbingan pascapanen ,pengolahan hasil pertanian.
- 5) Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit alsintan dan pengolahan hasil pertanian.
- 6) Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alsintan pengolahan hasil di bidang pertanian.
- 7) Melakukan pembinaan kepada kelompok tani dengan berpedoman kepada latihan kunjungan dan supervise.
- 8) Meningkatkan SDM penyuluh prtanian melalui.

- 9) Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang pertanian.
- 10) Melakukan fasilitasi promosi produk dibidang pertanian.
- 11) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan alsintan dan kegiatan penyuluhan pertanian.
- 12) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan penyuluhan pertanian.
- 13) Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan pertanian
- 14) Menyelenggarakan penyuluhan pertanian
- 15) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyuluhan pertanian.
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

m. Bidang Perkebunan.

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan.
- 3) Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan
- 4) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan.
- 5) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.

- 6) Penganggulangan gangguan usaha,dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan.
- 7) Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- 8) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan.
- 9) Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diperinahkan atasan.

n. Seksi Produksi Hasil Perkebunan.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemanfaatan dan evaluasi di bidang produksi hasil perkebunan.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyiapan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi hasil perkebunan.
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perkebunan.
- 3) Melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan.
- 4) Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan.
- 5) Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan.
- 6) Melakukan penususnan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi hasil perkebunan dan;
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan.

o. Seksi Tanaman Perkebunan

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi tanaman perkebunan.
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- 3) Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran / penggunaan benih di bidang perkebunan.
- 4) Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan.
- 5) Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan.
- 6) Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan.
- 7) Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan.
- 8) Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan.
- 9) Melakukan penyiapan bahan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan.
- 10) Melakukan penyiapan bahan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan.

- 11) Melakukan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organism pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan.
- 12) Melakukan pengelolaan data organismepengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan.
- 13) Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang perkebunan.
- 14) Melakukan penyiapan bahan pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan.
- 15) Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan.
- 16) Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan.
- 17) Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan.
- 18) Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi tanaman perkebunan dan;
- 19) Melakukan tugas lain yang diperintahkan ataan.

p. Seksi Usaha Tani Perkebunan.

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Fungsi:

- 1) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi usaha tani perkebunan.
- 2) Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- 3) Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan usaha unit pengolahan hasil di bidang perkebunan.
- 4) Melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan.
- 5) Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan.
- 6) Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan.
- 7) Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan.
- 8) Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis usaha, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- 9) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.
- 10) Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi usaha tani perkebunan.
- 11) Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan.

q. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam merencanakan ,melaksanakan evaluasi ,monitoring dan pengembangan profesi penyuluhan pertanian.

Fungsi:

- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan monitoring dan supervisi sesuai dengan fungsi tanggung jawab dan cakupan kerjanya.
- 2) Memfasilitasi proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha
- 3) Melakukan koordinasi program dengan sekretaris dan kepala bidang
- 4) Melakukan identifikasi potensi wilayah Kabupaten Labuhanbatu bersama penyuluh.
- 5) Melakukan analisa potensi wilayah Kabupaten Labuhanbatu bersama penyuluh.
- 6) Menyusun program penyuluhan pertanian setiap tahun berjalan berdasarkan wilayah dan cakupan kerjanya.
- 7) Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian sesuai jabatan fungsional penyuluh.
- 8) Melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program penyuluhan pertanian Kabupaten Labuhanbatu.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. Pengumpulan Data Pemungutan PPN atas transaksi Pengadaan Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu

Pada penelitian ini, penulis mengambil data transaksi pemungutan PPN atas pengadaan barang di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan batu, Rantau prapat yang beralamat di Jl.WR.Supratman No.24, yaitu data yang digunakan terhitung mulai dari Maret-Desember 2019 sampai dengan Maret-Desember 2020.

Berikut data Transaksi pemungutan PPN atas pengadaan barang pada masa sebelum dan selama pandemi pertahun terhitung mulai Maret-Desember 2019 s/d Maret- Desember 2020

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
10	08/03/19	0014/GU I/DTANI/2019	01.10 Dibayarkan kpd sdr. Zul Jauhari Peng. CV DHA Dhi Dhe pembelian ATK Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor pesanan no : 520/1202/Diperta-Sekr/II/2019 tgl 6 Februari 2019 BA & Faktur terlampir.	130.682,00		0,00
11		0015/GU I/DTANI/2019	01.11 Dibayarkan kepada sdr. Zul Jauhari Pengusaha CV Dha Dhi Dhe biaya fotocopy / penggandaan DPA dan LPPD Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan TA 2019 pesanan no : 520/1204/Diperta-Sekr/II/2019 tgl 6 Februari	218.182,00		218.182,00
12			01.11 Dibayarkan PPh dan PPH ps1 22 sdr. Zul Jauhari Pengusaha CV Dha Dhi Dhe biaya fotocopy / penggandaan DPA dan LPPD Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg. Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan TA 2019 pesanan no : 520/1204/Diperta Sekr/II/2019 t		218.182,00	0,00
13		0020/GU I/DTANI/2019	02.28 Dibayarkan PPN sdr. Ara Pengusaha Aracom biaya pemeliharaan (instal ulang dan service) Komputer dan printer Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor TA 2019 SPK no : 520/252/Diperta Sek		109.091,00	(109.091,00)
14			02.28 Dibayarkan kepada sdr. Ara Pengusaha Aracom biaya pemeliharaan (instal ulang dan service) Komputer dan printer Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor TA 2019 SPK no : 520/252/Diperta-Sek	109.091,00		0,00
15		0022/GU I/DTANI/2019	01.10 Dibayarkan kpd Zul Jauhari Pengusaha Dha Dhi Dhe pembelian ATK untuk keperluan ATK Pengemb. Teknologi Budidaya Koord. Dan Monitoring Informasi pasar dan Penyediaan Jasa Adm. Keuangan RKA Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran Keg. Penyediaan ATK TA 2019, pesan	324.991,00		324.991,00
16			01.10 Dibayarkan PPh dan PPH ps1 22 Zul Jauhari Pengusaha Dha Dhi Dhe pembelian ATK untuk keperluan ATK Pengemb. Teknologi Budidaya Koord. Dan Monitoring Informasi pasar dan Penyediaan Jasa Adm. Keuangan RKA Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran Keg. Penyediaan ATK		324.991,00	0,00
17		0023/GU I/DTANI/2019	06.01 Dibayarkan PPN dan PPH ps1 22 Zul Jauhari Pengusaha Dha Dhi Dhe pembelian ATK LAKIP Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA 2019 pesanan No. 52		186.727,00	(186.727,00)
18			06.01 Dibayarkan kpd Zul Jauhari Pengusaha Dha Dhi Dhe pembelian ATK LAKIP Prog. Peningkatan Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD TA 2019 pesanan No. 520/726/Pertan-Se	186.727,00		0,00
19	03/05/19	0100/GU II/DTANI/2019	01.10 Diberikan kpd sdr. Zul Jauhari dalimunthe peng. CV. Dha Dhi Dhe, Belanja ATK untuk Keperluan Bantuan Benih padi Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Kegiatan Penyediaan ATK Dinas Pertanian TA. 2019, sesuai dengan Pesanan No. 520/1152/Diperta/II/	118.045,00		118.045,00
20			01.10 Diberikan PPN sdr. Zul Jauhari dalimunthe peng. CV. Dha Dhi Dhe, Belanja ATK untuk Keperluan Bantuan Benih padi Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Kegiatan Penyediaan ATK Dinas Pertanian TA. 2019, sesuai dengan Pesanan No. 520/1152/Diperta/II/		118.045,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
21	03/05/19	0102/GJ II/DTANI/2019	01.10 Dibrkn PPN sdr. Ganda Siahaan Pengusaha UD. Anugerah, Belanja ATK Kegiatan Penyediaan ATK Program Pelayanan Administrasi perkantoran TA. 2019 pada Dinas Pertanian kab.labuhanbatu TA. 2019, sesuai dengan Pesanan No. 520/1377/Diperta/IV/2019 tanggal 11 Fe		135.891,00	(135.891,00)
22			01.10 Dibrkn kpd sdr. Ganda Siahaan Pengusaha UD. Anugerah, Belanja ATK Kegiatan Penyediaan ATK Program Pelayanan Administrasi perkantoran TA. 2019 pada Dinas Pertanian kab.labuhanbatu TA. 2019, sesuai dengan Pesanan No. 520/1377/Diperta/IV/2019 tanggal 11 Fe	135.891,00		0,00
23		0103/GJ II/DTANI/2019	01.10 Dibrkn Kpd Sdr. Zul Jauhari Pengusaha CV. Dha Dhi Dhe pembayaran ATK, Koordinasi dan Monitoring Informasi Pasar dan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DPA, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor TA. 2019, sesu	330.418,00		330.418,00
24			01.10 Dibrkn PPN dan PPh psi 22 Sdr. Zul Jauhari Pengusaha CV. Dha Dhi Dhe pembayaran ATK, Koordinasi dan Monitoring Informasi Pasar dan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan DPA, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor		330.418,00	0,00
25		0109/GJ II/DTANI/2019	15.01 Dibrkn PPN sdr. Ganda Siahaan Pengusaha UD. Anugerah, Belanja ATK untuk Kegiatan ATK kegiatan pelatihan Pengoperasian Alat Camera Drone bagi ASN Program Peningkatan kesejahteraan petani tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian kab.labuhanbatu TA. 2019		136.545,00	(136.545,00)
26			15.01 Dibrkn kpd sdr. Ganda Siahaan Pengusaha UD. Anugerah, Belanja ATK untuk Kegiatan ATK kegiatan pelatihan Pengoperasian Alat Camera Drone bagi ASN Program Peningkatan kesejahteraan petani tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pertanian kab.labuhanbatu TA. 2019, s	136.545,00		0,00
27		0132/GJ II/DTANI/2019	01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari dalimunthe peng. CV. Dha Dhi Dhe, Belanja ATK untuk Keperluan Kegiatan Demplot Tanaman Pangan dim Rangka Upaya khusus Swasembada Pangan Pajale di Kab. labuhanbatu Kegiatan Penyediaan ATK Dinas Pertanian TA. 2019, sesuai dengan	114.000,00		114.000,00
28			01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari dalimunthe peng. CV. Dha Dhi Dhe, Belanja ATK untuk Keperluan Kegiatan Demplot Tanaman Pangan dim Rangka Upaya Khusus Swasembada Pangan Pajale di Kab. labuhanbatu Kegiatan Penyediaan ATK Dinas Pertanian TA. 2019		114.000,00	0,00
29		0144/GJ II/DTANI/2019	01.10 Dibrkn PPN sdr. Zul jauhari pembayaran ATK utk kperluan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan ATK kantor Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu TA. 2019 sesuai dengan pesanan no : 520/2451/Diperta Sekr/III/2019 tanggal 14 maret 2019		92.909,00	(92.909,00)
30			01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul jauhari pembayaran ATK utk kperluan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan ATK kantor Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu TA. 2019 sesuai dengan pesanan no : 520/2451/Diperta-Sekr/III/2019 tanggal 14 maret 2019	92.909,00		0,00
31						

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
32						
33	27/05/19	0173/GJ III/DTANI/2019	18.01 Dibiryn PPN dan PPH pasal 22 sdrri Adek Pengusaha RM. Adek, Pembyaran Belanja Makan Nasi Kotak dan Snack Keg. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Jamur Akar Putih Prog. Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan TA. 2019, pada Dinas Pertanian Kab. Labuhanb		413.636,00	(413.636,00)
34			18.01 Dibiryn kpd sdrri Adek Pengusaha RM. Adek, Pembyaran Belanja Makan Nasi Kotak dan Snack Keg. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian jamr Akar Putih Prog. Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan TA. 2019, pada Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu sesuai dgn Pe	413.636,00		0,00
35		0174/GJ III/DTANI/2019	18.01 Dibiryn kpd Sdr. Abdul Karim Hasibuan Pimpinan UD. Mitra Usaha Tani, Pembayaran Belanja Bahan Praktik (Tricozhia) keg. Pelatihan dan Pengendalian Jamur Akar Putih Prog. Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan TA. 2019, pada Dinas Pertanian Kab. Labuhanb	1.772.727,00		1.772.727,00
36			18.01 Dibiryn PPN dan PPH pasal 22 Sdr. Abdul Karim Hasibuan Pimpinan UD. Mitra Usaha Tani, Pembayaran Belanja Bahan Praktk (Tricozhia) keg. Pelatihan dan Pengendalian Jamur Akar Putih Prog. Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan TA. 2019, pada Dinas Pertan		1.772.727,00	0,00
37		0176/GJ III/DTANI/2019	18.01 Dibiryn PPN dan PPH pasal 22 Sdr. Parlan Hasibuan Direktur CV. Parlan Jaya, Pembayaran Belanja Tas keg. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Jamur Akar Putih Prog. Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan TA. 2019, pada Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu		795.455,00	(795.455,00)
38			18.01 Dibiryn kpd Sdr. Parlan Hasibuan Direktur CV. Parlan Jaya, Pembayaran Belanja Tas keg. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Jamur Akar Putih Prog. Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan TA. 2019, pada Dinas Pertanian Kab. Labuhanbatu, sesuai dgn Pesa	795.455,00		0,00
39		0180/GJ III/DTANI/2019	02.24 Dibiryn pembelian Suku cadang utk kendaraan dinas roda 4 Mobil Innova BK. 1210 Y Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatue Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional TA. 2019, Dinas pertanian Kab. Labuhanbatu sesuai dengan pesanan N	1.156.818,00		1.156.818,00
40			02.24 Dibiryn PPN dan PPH pasal 22 pembelian Suku cadang utk kendaraan dinas roda 4 Mobil Innova BK. 1210 Y Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatue Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional TA. 2019, Dinas pertanian Kab. Labuhanbatu se		1.156.818,00	0,00
41	08/07/19	0223/GJ IV/DTANI/2019	02.24 Disetorkan PPN dan PPH psi 22 Nansi Pengusaha trans Auto Service, pembayaran atas pembelian Suku Cadang utk Kendaraan Dinas Roda 4 Mobil Pick up Double Cabin BK 8324 Y. Prog. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Keg.pemeliharaan Rutin/berkala Kendara		1.155.909,00	(1.155.909,00)

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
42	08/07/19	0223/GU IV/DTANI/2019	02.24 Dibirkin kpd nancy Pengusaha trans Auto Service, pembayaran atas pembelian Suku Cadang utk Kendaraan Dinas Roda 4 Mobil Pick-up Double Cabin BK 8324 Y. Prog. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Keg.pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasion	1.155.909,00		0,00
43		0224/GU IV/DTANI/2019	01.10 Dibirkin kpd Zul Jauhari Dalimunthe Peng. CV. Dha Dhi Dhe, Pembayaran Alat tulis kantor utk Keperluan keg. Pelatihan Penangkar Benih dan Praktek UPPO pada Prog. Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pertanian TA. 2019, sesuai dengan Pesanan No. 520/4402	153.709,00		153.709,00
44			01.10 Disetorkan PPN Zul Jauhari Dalimunthe Peng. CV. Dha Dhi Dhe, Pembayaran Alat tulis kantor utk Keperluan keg. Pelatihan Penangkar Benih dan Praktek UPPO pada Prog. Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pertanian TA. 2019, sesuai dengan Pesanan No. 520/4		153.709,00	0,00
45		0228/GU IV/DTANI/2019	15.01 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 sdr. Zul Jauhari Dalimunthe Peng. CV. Dha Dhi Dhe, Pembayaran alat tulis kantor utk keperluan kegiatan pelatihan dan pembinaan unit pengolah pupuk organik (UPPO) pada program peningkatan kesejahteraan petani di dinas pertanian		204.818,00	(204.818,00)
46			15.01 Dibirkin kpd sdr. Zul Jauhari Dalimunthe Peng. CV. Dha Dhi Dhe, Pembayaran alat tulis kantor utk keperluan kegiatan pelatihan dan pembinaan unit pengolah pupuk organik (UPPO) pada program peningkatan kesejahteraan petani di dinas pertanian TA. 2019, sesuai	204.818,00		0,00
47		0232/GU IV/DTANI/2019	15.01 Dibirkin kpd sdr. Triyani Peng. Mitra Tani, Pembayaran Bahan Praktek utk Keperluan Kegiatan pelatihan dan pembinaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Program Peningkatan kesejahteraan Petani di Dinas Pertanian TA. 2019, sesuai dgn Pesanan No. 520/463	1.136.364,00		1.136.364,00
48			15.01 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 sdr. Triyani Peng. Mitra Tani, Pembayaran Bahan Praktek utk Keperluan Kegiatan pelatihan dan pembinaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Program Peningkatan kesejahteraan Petani di Dinas Pertanian TA. 2019, sesuai dgn P		1.136.364,00	0,00
49		0234/GU IV/DTANI/2019	17.05 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 sdr. Agus Peng. Toko Sport Bandung, Pembayaran belanja pakaian kerja lapangan baju kaos peserta dan panitia dlm rangka "Bimbingan Teknis dan Pelatihan Praktek Pembuatan Agen Hayati", Keperluan Prog.Peningkatan Penerapan Tekno		477.273,00	(477.273,00)
50			17.05 Dibirkin kpd Agus Peng. Toko Sport Bandung, Pembayaran belanja pakaian kerja lapangan baju kaos peserta dan panitia dlm rangka "Bimbingan Teknis dan Pelatihan Praktek Pembuatan Agen Hayati", Keperluan Prog.Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebun	477.273,00		0,00
51		0235/GU IV/DTANI/2019	17.05 Dibirkin kpd Kusharyanto Direktur PT. POS MARATA, Pembayaran belanja bahan praktik kegalitan "Bimbingan Teknis dan Pelatihan Praktek Pembuatan Agen Hayati", Keperluan Prog.Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Keg. Pelatihan dan Bimbingan Pe	1.101.545,00		1.101.545,00
52			17.05 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 sdr. Kusharyanto Direktur PT. POS MARATA, Pembayaran belanja bahan praktik kegalitan "Bimbingan Teknis dan Pelatihan Praktek Pembuatan Agen Hayati", Keperluan Prog.Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		1.101.545,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
87	24/10/19	0511/GJ VII/DTANI/2019	17.05 Dibr/rn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , Pembayaran Barang habis pakai ATK peserta keperluan sosialisasi bimtek dan pelatihan praktek pembuatan Keg. Bimtek dan pelatihan praktek Pembuat. Inseksisida Hayati utk Tanaman Pangan TA. 2019 Keg. Pelatih	436.909,00		436.909,00
88			17.05 Dibr/rn PPN dan PPh psi 22 kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , Pembayaran Barang habis pakai ATK peserta keperluan sosialisasi bimtek dan pelatihan praktek pembuatan Keg. Bimtek dan pelatihan praktek Pembuat. Inseksisida Hayati utk Tanaman Pangan TA.		436.909,00	0,00
89		0514/GJ VII/DTANI/2019	15.01 Dibr/rn PPh dan PPh psi 22 sdr. Efendi JM Sihombing, SP Ka. laboratorium UPT BPTPH I , pmb/rn agen hayati keperluan pelaksanaan kegiatan Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) di 2 desa & 1 kelurahan , desa bandar tinggi, desa sei pengga		1.380.682,00	(1.380.682,00)
90			15.01 Dibr/rn kpd Efendi JM Sihombing, SP Ka. laboratorium UPT BPTPH I , pmb/rn agen hayati keperluan pelaksanaan kegiatan Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) di 2 desa & 1 kelurahan , desa bandar tinggi, desa sei penggantungan & kel. lobus	1.380.682,00		0,00
91		0516/GJ VII/DTANI/2019	17.05 Dibr/rn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , Pembayaran Barang habis pakai baju kaos dan panitia keperluan sosialisasi bimtek dan pelatihan praktek pembuatan Keg. Bimtek dan pelatihan praktek Pembuat. Inseksisida Hayati utk Tanaman Pangan TA. 2019 Pro	477.273,00		477.273,00
92			17.05 Dibr/rn PPN dan PPh psi 22 sdr. Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , Pembayaran Barang habis pakai baju kaos dan panitia keperluan sosialisasi bimtek dan pelatihan praktek pembuatan Keg. Bimtek dan pelatihan praktek Pembuat. Inseksisida Hayati utk Tanaman		477.273,00	0,00
93		0526/GJ VII/DTANI/2019	17.05 Dibr/rn PPN dan PPh psi 22 sdr. Efendi JM Sihombing, SP, Ks. Laboratorium UPT BPTH I, Pembay. B.Praktek Agen Hayati sbanyak 310 Liter Keperl.Pelaksanaan Sosialisasi keg. Bimtek & pelatihan praktek Pembuatan Inseksisida Hayati utk Tanaman Pangan TA. 2019,		1.141.364,00	(1.141.364,00)
94			17.05 Dibr/rn kpd Efendi JM Sihombing, SP, Ks. Laboratorium UPT BPTH I, Pembay. B.Praktek Agen Hayati sbanyak 310 Liter Keperl.Pelaksanaan Sosialisasi keg. Bimtek & pelatihan praktek Pembuatan Inseksisida Hayati utk Tanaman Pangan TA. 2019, Keg. Pelatihan dan B	1.141.364,00		0,00
95		0542/GJ VII/DTANI/2019	15.01 Dibr/rn kpd Efendi JM Sihombing, SP Ka. laboratorium UPT BPTPH I , pmb/rn agen hayati keperluan pelaksanaan kegiatan Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) di 2 desa , desa tanjung haloban & desa sei kasih keperluan sosialisasi Gerakan p	920.455,00		920.455,00
96			15.01 Dibr/rn PPN dan PPh psi 22 sdr. Efendi JM Sihombing, SP Ka. laboratorium UPT BPTPH I , pmb/rn agen hayati keperluan pelaksanaan kegiatan Gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) di 2 desa , desa tanjung haloban & desa sei kasih keperluan so		920.455,00	0,00
97	12/11/19	0552/GJ VIII/DTANI/2019	01.10 Dibr/rn kpd Zul jauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmb/rn ATK utk keperluan ATK Keg. Monitoring dan pelaporan dan ATK penyusunan rencana TA. 2020 Prog. Pelayanan administrasi peraknitoran keg. penyediaan ATK TA. 2019 No. Pesenan 520/3888/Pertan.Sekr/V/2019 tg		142.282,00	(142.282,00)
98			01.10	142.282,00		0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
99	12/11/19	0609/GJ VIII/DTANI/2019	18.03 Dibiryn kpd Triyani Peng. Mitra Tani, pembyrn belanja pupuk utk keperluan pengembangan tanaman nenas pd prog. Peningkatan produksi pertanian keg. Pengembangan bibit unggul pertanian dinas pertanian TA. 2019 No. Pesanan 520/6353/Diperta-II/2019 tgl 2 septemb	621.818,00		621.818,00
100			18.03 Dibiryn PPN dan PPH ps1 22 sdr. Triyani Peng. Mitra Tani, pembyrn belanja pupuk utk keperluan pengembangan tanaman nenas pd prog. Peningkatan produksi pertanian keg. Pengembangan bibit unggul pertanian dinas pertanian TA. 2019 No. Pesanan 520/6353/Diperta-I		621.818,00	0,00
101		0650/GJ VIII/DTANI/2019	16.15 Dibiryn kpd Jhon Bangun peng CV. Bangun Tani , pmbyrn benih jagung utk demplot tanaman jagung keperluankeg. Pengembangan intensifikasi traman padi palawija pd prog. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan TA. 2019 No. 520/7058/Diperta-II		102.273,00	(102.273,00)
102			16.15	102.273,00		0,00
103		0656/GJ VIII/DTANI/2019	16.15 Dibiryn kpd Jhon Bangun peng CV. Bangun Tani , pmbyrn pupuk utk demplot tanaman pagi keperluankeg. Pengembangan intensifikasi traman padi palawija pd prog. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan TA. 2019 No. 520/7281/Diperta-II/2019 tgl	307.091,00		307.091,00
104			16.15 Dibiryn PPN dan PPH ps1 22 sdr. Jhon Bangun peng CV. Bangun Tani , pmbyrn pupuk utk demplot tanaman pagi keperluankeg. Pengembangan intensifikasi traman padi palawija pd prog. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan TA. 2019 No. 520/7281		307.091,00	0,00
105		0657/GJ VIII/DTANI/2019	16.15 Dibiryn PPN dan PPH ps1 22 sdr. Jhon Bangun peng CV. Bangun Tani , pmbyrn pupuk utk demplot tanaman jagung keperluankeg. Pengembangan intensifikasi traman padi palawija pd prog. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan TA. 2019 No. 520/72		302.182,00	(302.182,00)
106			16.15 Dibiryn kpd Jhon Bangun peng CV. Bangun Tani , pmbyrn pupuk utk demplot tanaman jagung keperluankeg. Pengembangan intensifikasi traman padi palawija pd prog. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan TA. 2019 No. 520/7283/Diperta-II/2019 t	302.182,00		0,00
107	27/11/19	0688/GJ IX/DTANI/2019	17.02 Dibiryn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe pmbyrn pengadaan dan penjualan dokumen kontrak prog. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan , keg. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna TA. 2019 No. Pesan	111.136,00		111.136,00
108			17.02		111.136,00	0,00
109		0692/GJ IX/DTANI/2019	17.02		185.227,00	(185.227,00)
110			17.02	185.227,00		0,00
111		0693/GJ IX/DTANI/2019	01.10 Dibiryn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe pmbyrn belanja ATK keperluan prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK Dinas Pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2019 No. Pesanan 520/5159/Diperta-Sekr/VII/2019 tgl 10 Juli 2019	109.273,00		109.273,00
112			01.10		109.273,00	0,00
113		0694/GJ IX/DTANI/2019	01.11 Dibiryn kpd Zulfan peng. CV. Mutiara ZU biaya cetak lembar disposisi urk prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Dinas pertanian Kab. Labuhanbatu TA. 2019 No Pesanan 520/5426/Diperta-Sekr/VII/2019 tgl 23 Juli		107.091,00	(107.091,00)

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
114	27/11/19	0694/GU IX/DTANI/2019	01.11 Dibiryn kpd Zulfan peng. CV. Mutiara ZU biaya cetak lembar disposisi urk prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas pertanian Kab. Labuhanbatu TA. 2019 No Pesanan 520/5426/Diperta-Sekr/VII/2019 tgl 23 Juli	107.091,00		0,00
115		0697/GU IX/DTANI/2019	17.02 Dibiryn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe pmbyrn penggandaan dan perijilidan dokumen kontrak, prog. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan , keg. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna TA. 2019 No. Pesan	148.182,00		148.182,00
116			17.02		148.182,00	0,00
117		0698/GU IX/DTANI/2019	01.10 Dibiryn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe pmbyrn belanja ATK keperluan ATK Monitoring , Evaluasi pelaporan da pengembangan teknologi budidaya prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK Dinas Pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2019 No. Pe		163.518,00	(163.518,00)
118			01.10	163.518,00		0,00
119		0705/GU IX/DTANI/2019	01.10 Dibiryn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe pmbyrn belanja ATK keperluan prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK Dinas Pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2019 No. Pesanan 520/6069/Diperta-Sekr/VIII/2019 tgl 20 Agustus 2019	97.873,00		97.873,00
120			01.10		97.873,00	0,00
122			01.10	114.955,00		0,00
123		0716/GU IX/DTANI/2019	01.10 Dibiryn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe pmbyrn belanja ATK keperluan prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK Dinas Pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2019 No. Pesanan 520/6678/Diperta-Sekr/IX/2019 tgl 16 September 2019	95.573,00		95.573,00
124			01.10		95.573,00	0,00
125		0717/GU IX/DTANI/2019	01.10 Dibiryn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe pmbyrn belanja ATK keperluan ATK Penyediaan jasa Administrasi keuangan DPPA prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK Dinas Pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2019 No. Pesanan 520/6710/Pertan-Se		109.818,00	(109.818,00)
126			01.10	109.818,00		0,00
127		0718/GU IX/DTANI/2019	01.11 Dibiryn kpd Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe ombyrn biaya penggandaan DPPA utk keperluan prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , pada Dinas pertanian kab. labuhanbatu TA. 2019 No. Pesanan 520/6743/SPP/IX	90.909,00		90.909,00
128			01.11 17.02		90.909,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
139	16/12/19	0877/GU XI/DTANI/2019	02.09 Dibirkn kpd hendra Pengusaha Toko " New Central Computer" belanja modal pengadaan peralatan personal komputer, kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur An. Toko " New Central Computer" sesuai dgn pesana	2.925.000,00		2.925.000,00
140			02.09 Disetorkan PPN dan PPH ps1 22 sdr. hendra Pengusaha Toko " New Central Computer" belanja modal pengadaan peralatan personal komputer, kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur An. Toko " New Central Comp		2.925.000,00	0,00
141		0878/GU XI/DTANI/2019	02.07 Disetorkan PPN dan PPH ps1 22 Indra Kencana Pengusaha Toko " Cahaya Ria" belanja modal peralatan dan mesin, kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur An. Toko " Cahaya Ria " sesuai dgn pesanan no. 787/PP		1.100.000,00	(1.100.000,00)
142			02.07 Dibirkn kpd Indra Kencana Pengusaha Toko " Cahaya Ria" belanja modal peralatan dan mesin, kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur An. Toko " Cahaya Ria " sesuai dgn pesanan no. 787/PPB-DIPERTA/XI/2019	1.100.000,00		0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
143	16/12/19	0881/GU XI/DTANI/2019	03.05 Dibiryn kpd Ismail peng. CV. Cahaya Kencana , pmbryan pekerjaan prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur keg. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Pekerjaan pengadaan seragam batik, sesuai dgn SPK No. 932/PPKPB-DIPERTA/XI/2019 tgl 13 Nov 20	2.997.500,00		2.997.500,00
144			03.05 Disetorkan PPN dan PPH psl 22 sdr Ismail peng. CV. Cahaya Kencana , pmbryan pekerjaan prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur keg. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Pekerjaan pengadaan seragam batik, sesuai dgn SPK No. 932/PPKPB-DIPERTA		2.997.500,00	0,00
145		0882/GU XI/DTANI/2019	03.05 Disetorkan PPN dan PPH psl 22 sdr. Ismail peng. CV. Cahaya Kencana , pmbryan pekerjaan prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur keg. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Pekerjaan pengadaan Training Olah ragadan Jacket, sesuai dgn SPK No. 97		3.500.000,00	(3.500.000,00)
146			03.05 Dibiryn kpd Ismail peng. CV. Cahaya Kencana , pmbryan pekerjaan prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur keg. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Pekerjaan pengadaan Training Olah ragadan Jacket, sesuai dgn SPK No. 973/PPKPB-DIPERTA/XI/2019	3.500.000,00		0,00
				37.860.226,00	37.860.226,00	0,00

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN

Rantauprapat, 1 Januari 2019
BENDAHARA PENGELUARAN

AGUS SALIM RITONGA, SP
 NIP. 196808191995031001

NASRUM
 NIP. 196612312012121045

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
15	16/03/20	0026/GU I/DTANI/2020	01.10 Dibyrki kdp zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe belnja ATK utk kperluan prog. Pelayanan adminitrasi perkntoran, keg. Penyediaan ATK TA. 2020 No. Pesanan 520/1041/Diperta-sekr/II/2020 tgl 27 feb 2020	157.455,00		157.455,00
16			01.10 Dibayarkan PPh sdr. Zul Zauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe utk Belanja Penggandaan		157.455,00	0,00
17		0027/GU I/DTANI/2020	01.12 Dibayarkan PPh dan PPh psal 22 sdr. Acin Peng. Cahaya Ria Elektronik utk Belanja Alat Listrik		301.364,00	(301.364,00)
18			01.12 Dibyrki kdp Acin peng. Toko cahaya ria elektronik, belnja alat listrik dan elektronik utk kperluan prog. Pelayanan adminitrasi perkntoran, keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kntor TA. 2020 No. Pesanan 520/1223/Diperta-sekr/I	301.364,00		0,00
19		0028/GU I/DTANI/2020	01.11 Dibyrki kdp zulfan peng. CV. mutara zu, belnja cetak amplop berlogo dll utk kperluan prog. Pelayanan adminitrasi perkntoran, keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TA. 2020 No. Pesanan 520/1145/Diperta-sekr/III/2020 tgl 04 Maret 2020	142.000,00		142.000,00
20			01.11 Dibayarkan PPh sdr. Zul Zauhari Peng. CV. Dhe Dhi Dhe utk Belanja Cetak Amplop		142.000,00	0,00
21		0029/GU I/DTANI/2020	01.11 Dibayarkan PPh dan PPh psal 22 sdr. Zul Zauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe utk Belanja Cetak Map Dinas		321.455,00	(321.455,00)
22			01.11 Dibyrki kdp Zulfan peng. CV. mutara zu, belnja cetakmap dinas erwarna utk kperluan prog. Pelayanan adminitrasi perkntoran, keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TA. 2020 No. Pesanan 520/1353/Diperta-sekr/III/2020 tgl 16 Maret 2020	321.455,00		0,00
23	21/04/20	0034/GU II/DTANI/2020	01.10 Dibyrki kdp Manangar Napitupulu peng. UD. D' Ramothy pmbym ATK utk kperluan prog. Pelayan adminitrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK nidang perkebunan b/n Januari 2020 TA. 2020 No. Pesanan 520/53/Diperta-Bur/2020 tgl 06 Jan 2020	185.582,00		185.582,00
24			01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psl 22 Manangar Napitupulu peng. UD. D' Ramothy pmbym ATK utk kperluan prog. Pelayan adminitrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK nidang perkebunan		185.582,00	0,00
25		0056/GU II/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN sdr. Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbym biaya ATK dim rangka keperluan kegiatan pengembangan teknologi budidaya dan kegiatan jasa administrasi keuangan RKA dan DPA prog. Pelayanan adminitrasi perkantoran, keg. Penyediaan ATK		157.373,00	(157.373,00)
26			01.10 Dibyrki kdp sdr. Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbym biaya ATK dim rangka keperluan kegiatan pengembangan teknologi budidaya dan kegiatan jasa adminitrasi keuangan RKA dan DPA prog. Pelayanan adminitrasi perkantoran, keg. Penyediaan ATK TA. 2020	157.373,00		0,00
27		0084/GU II/DTANI/2020	01.10 Dibyrki kdp Zul jauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbym pesanan ATK prog. Pelayanan adminitrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK di dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/339/Diperta.tan/II/2020 tgl 21 jan 2020	107.455,00		107.455,00
28			01.10 Dibayarkan PPN Zul jauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbym pesanan ATK prog. Pelayanan adminitrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK di dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020		107.455,00	0,00
29		0099/GU II/DTANI/2020	06.01 Dibayarkan PPN dan PPh psl 22 Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbym biaya ATK utk keperluan ATK laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP) prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyus		231.818,00	(231.818,00)
30			06.01 Dibyrki kdp sdr. Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbym biaya ATK utk keperluan ATK laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP) prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyusunan laporan	231.818,00		0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
31	21/04/20	0109/GJ II/DTANI/2020	01.10 Dibyrkn kpd sdr. Zul Jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka keperluan kegiatan penyediaan PLA, PSP, monitoring pupuk, pestisida dan Alsintan prog. Pelayanan administrasi perkantoran, keg. Penyediaan ATL TA. 2020 No. Pesanan 520/599/Di	160.236,00		160.236,00
32			01.10 Dibayarkan PPN Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka keperluan kegiatan penyediaan PLA, PSP, monitoring pupuk, pestisida dan Alsintan prog. Pelayanan administrasi perkantoran, keg. Penyediaan ATL TA. 2020		160.236,00	0,00
33		0121/GJ II/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN Zul jauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn pesanan ATK prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK di dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/652/Diperta.tan/II/2020 tgl 06 feb 2020		100.409,00	(100.409,00)
34			01.10 Dibyrkn kpd Zul Jauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn pesanan ATK prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK di dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/652/Diperta.tan/II/2020 tgl 06 feb 2020	100.409,00		0,00
36						
37		0129/GJ II/DTANI/2020	06.04 Dibayarkan PPN dan PPh psi 22 Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK utk keperluan ATK penyusunan laporan keuangan akhir tahun , prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyusunan laporan keuanga		366.091,00	(366.091,00)
38			06.04 Dibyrkn kpd sdr. Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK utk keperluan ATK penyusunan laporan keuangan akhir tahun , prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	366.091,00		0,00
39		0147/GJ II/DTANI/2020	01.10 Dibyrkn kpd sdr. Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka keperluan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan daqn kegiatan jasa administrasi keuangan LPPD , prog. Pelayanan administrasi perkantoran, keg. Penyediaan ATK TA. 2020 No	184.645,00		184.645,00
40			01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psi 22 Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka keperluan kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan daqn kegiatan jasa administrasi keuangan LPPD , prog. Pelayanan administrasi perkantoran, keg. Penyediaan AT		184.645,00	0,00
41		0148/GJ II/DTANI/2020	06.04 Dibayarkan PPN Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka keperluan kegiatan pengandaan laporan keuangan akhir tahun prog. peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan keg. penyusunan laporan keuangan akhi		133.909,00	(133.909,00)
42			06.04 Dibyrkn kpd sdr. Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka keperluan kegiatan pengandaan laporan keuangan akhir tahun prog. peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan keg. penyusunan laporan keuangan akhi	133.909,00		0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
43	21/04/20	0150/GU II/DTANI/2020	01.10 Dibirin kpd Manangar Napitupulu peng. UD. D' Ramothy pmbyrn ATK utk keperluan prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK bidang perkebunan bln maret 2020 TA. 2020 No. Pesanan 520/1093/Diperta-Bun/2020 tgl 02 maret 2020	198.273,00		198.273,00
44			01.10 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 Manangar Napitupulu peng. UD. D' Ramothy pmbyrn ATK utk keperluan prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK bidang perkebunan bln maret 2020 TA. 2020		198.273,00	0,00
45		0160/GU II/DTANI/2020	02.24 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 nancy, peng. trans auto service, Pembayaran atas Pembelian Suku Cadang untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Mobil Innova BK. 1210 Y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendar		631.818,00	(631.818,00)
46			02.24 Dibirin kpd nancy, peng. trans auto service, Pembayaran atas Pembelian Suku Cadang untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Mobil Innova BK. 1210 Y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasio	631.818,00		0,00
47		0163/GU II/DTANI/2020	01.10 Dibirin kpd Zuljauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn pesanan ATK prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK di dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/1225/Diperta.tan/III/2020 tgl 09 maret 2020	101.227,00		101.227,00
48			01.10 Dibayarkan PPN Zul Jauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn pesanan ATK prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK di dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/1225/Diperta.tan/III/2020 tgl 09 maret 2020		101.227,00	0,00
49		0164/GU II/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN Zul Jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka keperluan kegiatan penyediaan PLA, PSP, monitoring pupuk, pestisida dan Alsintan prog. Pelayanan administrasi perkantoran, keg. Penyediaan ATK		94.009,00	(94.009,00)
50			01.10 Dibirin kpd sdr. Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka keperluan kegiatan penyediaan PLA, PSP, monitoring pupuk, pestisida dan Alsintan prog. Pelayanan administrasi perkantoran, keg. Penyediaan ATK TA. 2020 No. Pesanan 520/1253/D	94.009,00		0,00
51		0174/GU II/DTANI/2020	02.24 Dibirin kpd nancy, peng. trans auto service, Pembayaran atas Pembelian Suku Cadang untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Mobil Pick-up Double Cabin BK. 8324 Y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan	677.273,00		677.273,00
52			02.24 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 nancy, peng. trans auto service, Pembayaran atas Pembelian Suku Cadang untuk Kendaraan Dinas Roda 4 (empat), Mobil Pick up Double Cabin BK. 8324 Y. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/		677.273,00	0,00
53		0175/GU II/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN Zul Jauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn pesanan ATK prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK di dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/1379/Diperta.tan/III/2020 tgl 17 maret 2020		126.782,00	(126.782,00)
54			01.10 Dibirin kpd Zul Jauhari Peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn pesanan ATK prog. Pelayanan administrasi perkantoran keg. Penyediaan ATK di dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/1379/Diperta.tan/III/2020 tgl 17 maret 2020	126.782,00		0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
55	21/07/20	0199/GU III/DTANI/2020	18.01 Dibrkn kpd Agus romansyah peng. Toko bandung sport, pmbrn blnja barang pakai habis by. tas peserta sebanyak 70 buah prog. Peningkatan produksi pertanian keg. Pelatihan pengendalian jamur akar putih No. pesanan 520/1097/Diperta-Bun/2020 tgl 2 maret 2020	795.455,00		795.455,00
56			18.01 Dibayarkan PPN dan PPh psl 22 Agus romansyah peng. Toko bandung sport, pmbrn blnja barang pakai habis by. tas peserta sebanyak 70 buah prog. Peningkatan produksi pertanian keg. Pelatihan pengendalian jamur akar putih No. pesanan 520/1097/Diperta Bun/2020		795.455,00	0,00
57		0200/GU III/DTANI/2020	18.01 Dibayarkan PPN dan PPh psl 22 Syahril amri siahaan peng. UD. Kualuh tari, pmbrn blnja bahan praktik keg. Pelatihan pengendalian jamur akar putih (JAP) prog. Peningkatan produksi pertanian keg. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian		1.781.818,00	(1.781.818,00)
58			18.01 Dibrkn kpd Syahril amri siahaan peng. UD. Kualuh tari, pmbrn blnja bahan praktik keg. Pelatihan pengendalian jamur akar putih (JAP) prog. Peningkatan produksi pertanian keg. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian No. pesanan 520/1096/Diperta-Bun/2020 t	1.781.818,00		0,00
59		0288/GU III/DTANI/2020	01.10 Dibrkn kpd sdr Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyran blnja ATK subbidang sekretariat utk kperluan prog. Pelayan administrasi perkntoran, keg. Pnyediaan barang cetakan dan penggandaan , Dinas pertanian kab. labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/1665/D	189.227,00		189.227,00
60			01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psl 22 Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyran blnja ATK subbidang sekretariat utk kperluan prog. Pelayan administrasi perkntoran, keg. Pnyediaan barang cetakan dan penggandaan , Dinas pertanian kab. labuhanbatu TA. 2020		189.227,00	0,00
61		0289/GU III/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka kperluan keg. Penyediaan PLA, PSP, Monitoring pupuk dan pestisida dan Alisntan, prog. Pelayanan administrasi perkantoran, Keg. Penyediaan ATK TA. 2020		113.082,00	(113.082,00)
62			01.10 Dibrkn kpd Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyrn biaya ATK dlm rangka kperluan keg. Penyediaan PLA, PSP, Monitoring pupuk dan pestisida dan Alisntan, prog. Pelayanan administrasi perkantoran, Keg. Penyediaan ATK TA. 2020 No. Pesanan 520/1743/Diperta	113.082,00		0,00
63		0296/GU III/DTANI/2020	01.01 Dibrkn kpd sdr Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyran blnja benda pos (materai) utk kperluan prog. Pelayan administrasi perkntoran, keg. Pnyediaan barang cetakan dan penggandaan , Dinas pertanian kab. labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/2237/Diperta-	136.364,00		136.364,00
64			01.01 Dibayarkan PPN Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyran blnja benda pos (materai) utk kperluan prog. Pelayan administrasi perkntoran, keg. Pnyediaan barang cetakan dan penggandaan , Dinas pertanian kab. labuhanbatu TA. 2020		136.364,00	0,00
65		0297/GU III/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyran blnja ATK subbidang sekretariat utk kperluan prog. Pelayan administrasi perkntoran, keg. Pnyediaan barang cetakan dan penggandaan , Dinas pertanian kab. labuhanbatu TA. 2020		120.055,00	(120.055,00)
66			01.10 Dibrkn kpd sdr Zul jauhari peng. CV. Dha Dhi Dhe , pmbyran blnja ATK subbidang sekretariat utk kperluan prog. Pelayan administrasi perkntoran, keg. Pnyediaan barang cetakan dan penggandaan , Dinas pertanian kab. labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/2367/D	120.055,00		0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
67	21/07/20	0298/GU III/DTANI/2020	01.08 Dibykn kpd sdr Khairul Lubis peng. Duta pertiwi , pmbyrn belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih utk keperluan prog. Pelayan administrasi perkntoran, keg. Pnyediaan barang cetakan dan penggandaan , Dinas pertanian kab. labuhanbatu TA. 2020 No. Pes.	194.091,00		194.091,00
68			01.08 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 Khairul Lubis peng. Duta pertiwi , pmbyrn belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih utk keperluan prog. Pelayan administrasi perkntoran, keg. Pnyediaan barang cetakan dan penggandaan , Dinas pertanian kab. labuhanbatu T		194.091,00	0,00
69	25/11/20	0359/GU IV/DTANI/2020	01.10 Dibyrkn kpd sdr. Zul Jauhari. Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbyrn belanja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayana administrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/3095/Diperta-Sekr/VII/	181.182,00		181.182,00
71		0423/GU IV/DTANI/2020	01.10 Dibyrkn kpd sdr. Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbyrn belanja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayana administrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/4006/Diperta-Sekr/VIII	199.364,00		559.810,00
72		0450/GU IV/DTANI/2020		155.264,00		715.074,00
75		0423/GU IV/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN dan PPh ps1 22 sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbyrn belanja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayana administrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/4006/		199.364,00	155.264,00
77	17/12/20	0467/GU V/DTANI/2020	01.10 dibyrkn kpd sdr. Manangar Napitupulu Peng. UD. D'Ramothy, pmbyrn belanja ATK utk keperluan Prog. Pelayanan administrasi perkantoran, Kec. Penyediaan ATK kegiatan bid. Perkebunan utk bln april s/d juni 2020, Dinas pertanian Kabupaten Labuhanbatu TA. 2020 No.	194.664,00		194.664,00
78		0468/GU V/DTANI/2020	01.10 dibyrkn kpd sdr. Manangar Napitupulu Peng. UD. D'Ramothy, pmbyrn belanja ATK utk keperluan Prog. Pelayanan administrasi perkantoran, Kec. Penyediaan ATK pengadaan barang dan jasa utk bln juni s/d agustus 2020, Dinas pertanian Kabupaten Labuhanbatu TA. 2020	248.091,00		442.755,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
79	17/12/20	0475/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK jasa administrasi keuangan RKA 2021 prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/3201/Diperta-Sekr/VII/	210.291,00		653.046,00
80		0476/GJ V/DTANI/2020	06.02 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK utk keperluan prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan keg. penyusunan pelaporan keuangan, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan	208.364,00		861.410,00
81		0478/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK monitoring evaluasi dan pelaporan dan koordinasi dan monitoring informasi harga pasar prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanba	123.009,00		984.419,00
82		0483/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK monitoring evaluasi dan pelaporan , pengembangan teknologi budidaya dan koordinasi, monitoring informasi harga pasar dan RKA P prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Keg. penyedia	329.155,00		1.313.574,00
83		0484/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/4317/Diperta-Sekr/IX/2	222.364,00		1.535.938,00
84		0533/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK monitoring evaluasi dan pengembangan teknologi budidaya dan koordinasi, monitoring informasi harga pasar dan DPPA prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada di	250.064,00		1.786.002,00
85		0582/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibrkn kpd sdr. Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5074/Diperta-Sekr/X/20	226.091,00		2.012.093,00
86	28/12/20	0467/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPh dan PPh ps1 22 sdr Manangar Napitupulu Peng. UD. D'Ramothy, pmbymn belnaja ATK utk keperluan Prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Kec. Penyediaan ATK kegiatan bid. Perkebunan utk bin april s/d juni 2020, Dinas pertanian Kabupaten Labuhan		194.664,00	1.817.429,00
87		0468/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPh dan PPh ps1 22 sdr Manangar Napitupulu Peng. UD. D'Ramothy, pmbymn belnaja ATK utk keperluan Prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Kec. Penyediaan ATK pengadaan barang dan jasa utk bin juni s/d agustus 2020, Dinas pertanian Kabupaten Lab		248.091,00	1.569.338,00
88		0475/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPh dan PPh ps1 22 sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK jasa administrasi keuangan RKA 2021 prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/3201/		210.291,00	1.359.047,00
89		0476/GJ V/DTANI/2020	06.02 Dibayarkan PPh dan PPh ps1 22 sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK utk keperluan prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan keg. penyusunan pelaporan keuangan, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu T		208.364,00	1.150.683,00
90		0478/GJ V/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPh sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbymn belnaja ATK monitoring evaluasi dan pelaporan dan koordinasi dan monitoring informasi harga pasar prog. Pelayanan adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhan		123.009,00	1.027.674,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
91	28/12/20	0483/GU V/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psi 22 sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK monitoring evaluasi dan pelaporan , pengembangan teknologi budidaya dan koordinasi, monitoring informasi harga pasar dan RKA-P prog. Pelayanan administrtasi perkantor		329.155,00	698.519,00
92		0484/GU V/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psi 22 sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/4317/		222.364,00	476.155,00
93		0533/GU V/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psi 22 sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK monitoring evaluasi dan pengembangan teknologi budidaya dan koordinasi, monitoring informasi harga pasar dan DPPA prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyed		250.064,00	226.091,00
94		0582/GU V/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psi 22 sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5074/		226.091,00	0,00
95		0635/GU NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibrn kpd sdr. Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5359/Diperta-Sekr/XII/	230.636,00		230.636,00
96		0651/GU NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibrn kpd sdr. Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5409/Diperta-Sekr/XI/2	168.182,00		398.818,00
97		0666/GU NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibrn kpd sdr. Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK jasa administrtasi keuangan RKA 2021prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5539/Diperta-Sekr/XI/2	117.636,00		516.454,00
98		0702/GU NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibrn kpd sdr. Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5799/Diperta-Sekr/XII/	218.182,00		734.636,00
99		0724/GU NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibrn kpd sdr. Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5851/Diperta-Sekr/XII/	145.500,00		880.136,00
100	29/12/20	0635/GU NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psi 22 sdr Zul Jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5359/		230.636,00	649.500,00
101		0651/GU NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN sdr Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5409/Diperta-Sekr/XI		168.182,00	481.318,00
102		0666/GU NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN sdr Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbym belnaja ATK jasa administrtasi keuangan RKA 2021prog. Pelayanan administrtasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5539/Diperta-Sekr/XI		117.636,00	363.682,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
103	29/12/20	0702/GJ NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN dan PPh psi 22 sdr ZZul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbyrn belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayana adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5799		218.182,00	145.500,00
104		0724/GJ NIHIL/DTANI/2020	01.10 Dibayarkan PPN sdr Zul jauhari, Peng. CV. Dha Dhi Dhe, pmbyrn belnaja ATK subbidang Sekretariat utk keperluan prog. Pelayana adminstrasi perkantoran, Keg. penyediaan ATK, pada dinas pertanian kab. Labuhanbatu TA. 2020 No. Pesanan 520/5851/Diperta-Sekr/XI		145.500,00	0,00
				13.218.806,00	13.218.806,00	0,00

Mengetahui,
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN

Rantauprapat, 1 Januari 2020
BENDAHARA PENGELUARAN

AGUS SALIM RITONGA, SP
 NIP. 196808191995031001

NASRUM
 NIP. 196612312012121045

B. PEMBAHASAN

1. Analisis mengenai pemungutan PPN atas pengadaan barang pada masa sebelum pandemi Maret-Desember 2019

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis mengkaji bahwasannya telah sesuai dengan perundang undangan. Terlihat dari data tahunan buku pajak bahwa pemungutan PPN Atas pengadaan barang Maret-Desember 2019 masih dikatakan membaik dan signifikan, salah satu faktor yang mendukung adalah anggaran yang diberikan pemerintah masih cukup dan sangat stabil. Selain itu kegiatan efektifitas kantor berjalan dengan baik dan sangat mendukung.

Berdasarkan data table Maret 2019 data diatas data transaksi pemungutan PPN transaksi pengadaan barang di Di dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan bahwa terdapat 9 data Maret 2019 yang melakukan pemotongan PPN atas transaksi pengadaan barang. data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan pajak). adapun transaksi pada data tabel diatas yaitu atas pembelian alat tulis kantor untuk keperluan administrasi, program pelayanan dan penyediaan barang cetakan dengan transaksi pemotongan PPN pada bulan Maret 2019 sebesar Rp.1.526.171,pada bulan berikutnya Berdasarkan data tabel april 2019 atas data transaksi pemungutan PPN transaksi pengadaan barang di Di dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan bahwa pada maret 2019 tidak adanya transaksi atas pengadaan barang,tidak terjadinya transaksi ini disebabkan karena tidak adanya pencairan anggaran dari pemerintah. Selanjutnya, data transaksi pemungutan PPN transaksi pengadaan barang di Di dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu menjelaskan bahwa terdapat 10 data Mei 2019 yang melakukan pemotongan PPN atas transaksi

pengadaan barang. data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan pajak). Dengan transaksi pemotongan PPN pada bulan Mei 2019 sebesar Rp.5.066.444. dan pada Juli 2019 tercatat Rp.6.444.646 (enam juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah). data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan pajak). adapun pembayaran transaksi pada data tabel diatas yaitu atas pembelian biaya ATK pembayaran belanja habis pakai, penyediaan alat tulis kantor, pada Agustus 2019 tercatat Rp.4.838.865(empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan pajak). adapun pembayaran transaksi pada data tabel diatas yaitu untuk keperluan program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Oktober 2019 tercatat Rp.3.999.410 (Tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah). data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah dihitung 10x DPP (Dasar Pengenaan pajak). adapun pembayaran transaksi pada data tabel diatas yaitu untuk keperluan pembiayaan pembelian agen hayati untuk praktek kegiatan bimtek. transaksi pemotongan PPN pada bulan November 2019 sebesar Rp.2.809.201. dan pada bulan terakhir pemotongan PPN pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.10.522.500.

Adapun Undang - Undang yang terdapat di pembahasan PPN yang menyangkut Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta ada juga Undang - Undang tentang tarif terhadap PPN yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen), Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian penulis juga mengamati bahwa kantor dinas pertanian Kabupaten LabuhanBatu telah melakukan pemungutan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dari Pasal dan Undang – Undang diatas maka tingkat perbandingan PPN Pada masa sebelum dan selama covid sudah sesuai, baik penelitian saat ini maupun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Astriana (2020) dengan judul ”Penerapan PPN atas pengadaan barang pada PT.GIANT INDONESIA cabang sultan Allauddin” , Amalia putri (2018) dengan judul “Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang pada PT.CENTRAL WIJAYA MEDAN” , Dewanty putri efendy(2016) dengan judul ” Analisis pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah(study di kasus pada kantor keuangan kore 131/santiago)” , Watik chandrawijaya(2018) dengan judul “Prosedur pengenaan PPN atas pengadaan barang kena pajak pada PT Perkebunan nusantara XI PERSERO PG.OLEAN SITUBONDO” , Rahmalia (2017) dengan judul “Prosedur perhitungan dan pelaporan PPN atas pengadan barang yang di

danai sumber dana otsus pada dinas perhubungan kota banda aceh” perbandingan yang signifikan dari penulis dan penelitian terdahulu bahwa pada penelitian ini sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku serta pada sistem pemungutannya menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) .

2. Analisis mengenai Tingkat Pemungutan PPN Selama pandemi atas pengadaan barang terhitung Maret-Desember 2020

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis mengkaji bahwasannya telah sesuai dengan perundang undangan namun adapun masalah didalamnya yaitu tentang menurunnya jumlah PPN atas pengadaan barang pada dinas pertanian Kabupaten Labuhan Batu terjadinya penurunan jumlah PPN dikarenakan kurangnya anggaran dan berkurangnya jumlah pengadaan barang yang disebabkan adanya pandemi yang membuat kegiatan kantor terbatas dikarenakan adanya WFH (*Work From Home*) sehingga pegawai yang ada di kantor juga jarang sekali untuk menggunakan barang habis pakai atau alat kantor dan juga kegiatan kantor tidak seefektif sebelum adanya masa pandemi.

Berdasarkan analisis data buku pajak tahunan transaksi pemotongan pada bulan maret 2020 tercatat Rp.2.658.520 (dua juta enam ratus lima puluh delapan lima ratus dua puluh rupiah) data tabel menunjukkan bahwa nilai yang tertera sudah dihitung 10 x DPP (Dasar Pengenaan pajak),selanjutnya transaksi atas pengadaan barang dan pada april 2020 tercatat Rp.3.456.900 (Tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah), transaksi pemotongan pada bulan mei 2020 tercatat Rp.3.330.092 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu Sembilan puluh dua rupiah). data tabel per Juli,agustus, dan Oktober 2020 atas data transaksi pemungutan PPN transaksi ini disebabkan karena tidak adanya

pencairan anggaran oleh pemerintah, dan dengan situasi pandemi efektivitas kantor tidak seperti biasanya. dan data bulan terakhir transaksi pemotongan pada bulan Desember 2020 tercatat Rp.2.892.229 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah) .

Dari Pasal dan Undang – Undang diatas maka tingkat perbandingan PPN Pada masa sebelum dan selama covid sudah sesuai, baik penelitian saat ini maupun penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Astriana (2020) dengan judul ”Penerapan PPN atas pengadaan barang pada PT.GIANT INDONESIA cabang sultan Allauddin” , Amalia putri (2018) dengan judul “Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang pada PT.CENTRAL WIJAYA MEDAN” , Dewanty putri efendy(2016) dengan judul ” Analisis pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah(studi kasus pada kantor keuangan kore 131/santiago)” , Watik chandrawijaya(2018) dengan judul “Prosedur pengenaan PPN atas pengadaan barang kena pajak pada PT Perkebunan nusantara XI PERSERO PG.OLEAN SITUBONDO” , Rahmalia (2017) dengan judul “Prosedur perhitungan dan pelaporan PPN atas pengadanan barang yang di danai sumber dana otsus pada dinas perhubungan kota banda aceh” .

3. Analisis Tingkat Perbandingan Pemungutan PPN Pada Masa sebelum Dan selama Pandemi.

Berdasarkan analisis penulis dijelaskan bahwa tingkat perbandingan pemungutan PPN atas transaksi pengadaan barang di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu memiliki tingkat perbandingan dari tahun ke tahun dengan selisih tarif yang berbeda disetiap data perbulannya. dalam pemotongan dari Maret 2019- Maret 2020 dapat dilihat bahwa Tansaksi pada bulan Maret 2020 lebih besar

pemotongannya dibandingkan 2019, dengan selisih tariff Rp.1.132.349 (satu juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). Bulan april 2019 dan 2020 tidak adanya selisih tarif dikarenakan hanya pada tahun april 2020 Dinas pertanian Kabupaten Labuhan Batu Melakukan Pemungutan PPN Atas Pengadaan Barang.selanjutnya, dalam pemotongan dari Mei 2019- Mei 2020 dapat dilihat bahwa Tansaksi pada bulan Mei 2019 lebih besar pemotongannya dibandingkan 2020, dengan selisih tarif Rp.1.736.352 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga lima puluh dua rupiah).pada bulan juli,agustus, dan Oktober 2020 tidak adanya transaksi atas pengadaan barang,dan data di bulan tersebut tidak ditemukan selisih tarif keduanya. .dalam pemotongan dari November 2019- November 2020 dapat dilihat bahwa Tansaksi pada bulan November 2019 lebih besar pemotongannya dibandingkan 2020, dengan selisih tarif Rp.2.273.391 (Dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah). pemotongan dari desember 2019- Desember 2020 dapat dilihat bahwa Tansaksi pada bulan Desember 2019 lebih besar pemotongannya dibandingkan 2020, dengan selisih tarif Rp.7.630.271 (tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).jika ditotalkan secara keseluruhan selisih tarif Rp. 24.641.420

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis didalam tingkat perbandingan pemungutan PPN di Di Dinas pertanian Kabupaten Labuhan Batu menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan tingkat perbandingan Pemungutan PPN pada masa sebelum dan selama pandemi Di Dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu mengalami penurunan yang sangat signifikan dan selisih yang dapat dikatakan cukup banyak dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan kurangnya anggaran dari pemerintah dikarenakan wabah cirus covid-19 sehingga aktifitas kegiatan kantor yang kurang membaik dan telah dijelaskan bahwa tidak adanya transaksi data perbulan disebabkan karena tidak adanya pencairan anggaran dari pemerintah. sehingga selisih tariff dari tahun sebelum pandemi dan selama pandemi mencapai Rp.24.641.420
2. Berdasarkan hasil pemungutannya Dinas Pertanian kabupaten Labuhan Batu yang berperan sebagai pemungut PPN sudah menjalankan pemotongan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali dalam perubahan ketiga menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

B. SARAN

Pada dasarnya sistem pemungutan yang dilakukan Pada Dinas Pertanian sudah berjalan dengan baik. Namun didalam penelitian dan penyelesaian tugas

akhir ini mempunyai saran dari penulis yang bersifat membangun diantaranya:

1. Anggaran yang tetap di stabilkan dalam menjalankan aktivitas kantor agar semuanya berjalan dengan efektif dan efisien. Di upayakan tidak adanya kesalahan di dalam pemungutan dalam pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

Adiman, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Permohonan Pengajuan Keberatan Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 69-79.

Adiman, S. (2021). *Effect Of Effectiveness Of Collection Of Costs Of Obtaining Rights To Land And Buildings (Bphtb) On Income Original Area In West Aceh Daya District*. *Accounting and Business Journal*, 3(1), 49-60.

Adiman, S. (2020). Pengaruh Penerapan PP no 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.

Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan*. In *International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182).

Buku

Ilyas dan Bruton.2010.*Hukum Pajak dan Perpajakan indonesia*. Bandung,

Alfabeta

Mardiasmo. 2010. *Perpajakan Edisi Revisi 2010*.Yogyakarta: Penerbit Andi

Tjahjono.2010. Sanksi pajak sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari

Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional).
Jurnal Administrative Law & Governance, Vol. 1(1).

Untung Sukardji, 2011:1. *Perpajakan PPN*. Jakarta ; Salemba Empat
Sugiyono,2016.

Metode Penelitian Deskriptif, Kualitatif dan R&D. Bandung.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat Suandy.2011.

Dasar-

dasar hukum pajak dan tata cara pajak Suandy.

Jurnal

Astriana. (2020). *Penerapan PPN atas Pengadaan Barang pada PT Giant*

Indonesia

Cabang Sultan Allaudin Ps:Perpajakan, Jurusan Perpajakan, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Chandrawijaya, watik (2018) *prosedur pengenaan PPN atas Pengadaan barang
kena pajak pada PT Pekebunan Nusantara XI Persero Olean
Situbundo, Pertanian*, Jurusan Perpajakan, Universitas Pamulang.

Dewanty, Puri, Efendy (2016). *Analisis Pemungutan PPN Oleh Bendaharawan
Pemerintah Santiago*, Jurusan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjajaran.

Putri, Amalia. (2018). *Analisis Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai*

atas penjualan barang pada PT,CENTRAL WIJAYA MEDAN,Jurusan Akuntansi,Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Universitas Medan Area.

Rahmalia (2017).*Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPN atas Pengadaan Barang yang di danai sumber otsus Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*.jurusan Akuntansi, Universitas Medan Area

PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN

RepublikIndonesiaUndang-UndangNomor42Tahun2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 TentangPajak Pertambahan nilai Barangdan Jasa Penjualan Atas Barang Mewah.

PeraturanMenteriKeuanganNomor06/PMK/2021JenisTentang Pehitungan dan Pematongan PPN sehubungan dengan barang dan jasa